

# Bibliografi

Bongy FAO  
14/10/08



~~001-63~~

SOL  
P

S. Lmpt &

---

PROF. DR. IR. H. SOLEH SOLAHUDDIN, MSC.  
MENTERI PERTANIAN

631.339.96  
SOL

P

~~2.358~~

3.381

## Pembangunan Pertanian **ERA REFORMASI**





## KATA PENGANTAR

Peran pertanian sebagai sektor andalan dalam perekonomian nasional telah terbukti secara empiris, baik di kala kondisi ekonomi normal maupun pada saat menghadapi krisis. Peran pokok pertanian sebagai mesin penggerak ekonomi nasional dalam hal menciptakan ketahanan pangan, mendukung berkembangnya sektor sekunder dan tersier, serta menyumbang penerimaan devisa dapat dijalankan dengan baik. Dalam masa krisis ekonomi yang mulai dirasakan pada pertengahan tahun 1997, peran pertanian tersebut menjadi semakin menonjol. Dengan upaya dan kerja keras produksi pangan dapat ditingkatkan walaupun dalam kondisi yang serba sulit karena terjadi kelangkaan dan naiknya harga-harga sarana produksi. Demikian juga, walaupun secara nasional ekonomi mengalami kontraksi sebesar 13.6 persen, pertanian dapat tumbuh positif sebesar 0.26 persen. Dalam hal penyediaan kesempatan kerja bagi pengangguran baru dari kota ke desa, pertanian juga mampu sebagai katup pengaman dengan menampung tambahan tenaga yang cukup besar.

Perjalanan sekitar satu tahun sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Reformasi Pembangunan telah memberikan pengalaman berharga untuk dapat mempelajari, memahami dan menerapkan kebijakan-kebijakan pembangunan pertanian, agar peran pertanian sebagai sektor andalan ataupun mesin penggerak ekonomi nasional betul-betul dapat diwujudkan. Pengalaman berharga juga diperoleh manakala betapa tidak mudah mengupayakan terciptanya kebijakan yang mencerminkan keberpihakan kepada petani dalam upaya lebih memberdayakan petani, peternak, dan nelayan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Pertanian masa depan dihadapkan pada perubahan mendasar akibat perubahan perekonomian global, perkembangan teknologi biologis, berbagai kesepakatan internasional, tuntutan kualitas produk, kelestarian lingkungan, keamanan produk, dan hak azasi manusia. Perkembangan lingkungan strategis tersebut telah berpengaruh pada perumusan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi dunia.

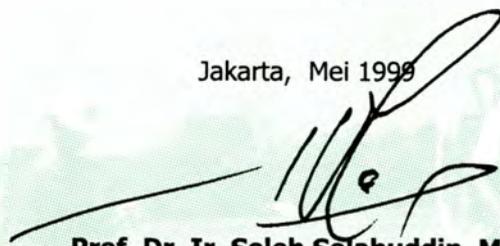


Mengingat Indonesia merupakan bagian dari komunitas dunia, kebijakan pembangunan nasional termasuk pertanian tidak dapat lagi dilakukan secara independen terhadap lingkungan luar. Sementara itu, dengan semangat reformasi, lingkungan strategis domestik menghendaki pembangunan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, serta memperhatikan keseimbangan antar daerah. Dalam era reformasi ini, lingkungan strategis tersebut telah dijadikan salah satu pertimbangan penting dalam setiap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan pertanian.

Buku ini merupakan kristalisasi dari pemikiran mengenai pembangunan pertanian; menyajikan konsep pemikiran, strategi, kebijakan, dan langkah-langkah operasional pembangunan pertanian yang telah diformulasikan dan diimplementasikan sejak Kabinet Reformasi Pembangunan terbentuk. Diharapkan melalui buku ini dapat disosialisasikan, pemikiran-pemikiran terobosan yang telah diimplementasikan dalam pembangunan pertanian pasca orde baru.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyampaikan saran dan kritikan atas konsep pembangunan pertanian era reformasi yang telah saya sampaikan dalam berbagai kesempatan pertemuan, baik dengan kalangan praktisi, birokrasi, maupun masyarakat akademis. Semua itu dijadikan bahan penyempurnaan pemikiran selanjutnya, sampai terwujudnya buku ini. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penyelenggaraan pembangunan pertanian masa datang, agar sosok pertanian Indonesia tetap mampu berperan sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Jakarta, Mei 1998



**Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc.**



---

## AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN THE REFORMATION ERA

Agriculture has always been instrumental in supporting Indonesia's economic development. The sector's annual growth rate averaged around 3 per cent over 25 years, making it possible to provide relatively cheap food for 200 million population, and support the development of manufacturing industries by providing raw materials. Indonesia thus far has managed to cope with its food problems, because of the wealth of natural endowment resources, with hard working farmers and supported by effective government policies.

Despite the effects of the 1997 drought in most parts of the country and tremendous dislocations caused by the crisis, the agriculture sector demonstrated tremendous resilience in coping with the economic crisis. Although the national economy experienced a contraction of 13.6 per cent in 1998, the agriculture sector posted a positive growth of 0.26 per cent, while other sectors experienced negative growth.

The economic crisis has raised the reform spirit throughout the country, and the reform covers almost all aspects of public life. In line with this trend, a number of significant steps have been taken in economic as well as political reforms. In the economic aspect, the direction of the reform is directed toward more liberalization, restructuring of the economy to increase private sector participation, supporting small and medium scale enterprises to take an important role in the national economy. These are done by creating incentives, removing barriers, and promoting decentralization of economic activities and regional economic centers.

In agriculture, this implies a total adjustment and reformation of policies and strategies to promote agriculture development in the future. Along this line the vision of Indonesia agriculture is to create a modern, resilient, and efficient



---

agriculture. With this vision, it is expected that farmers will be efficient in utilizing resources, which enable them to compete strongly in global economy and will be highly flexible in responding to the dynamic changes of commodity markets, both domestic and international. This type of agriculture will be achieved by (i) optimizing the use of domestic resources such as land, water, germ plasma, labor, capital and technology, (ii) broadening the spectrum of agricultural development through diversification of technology, resources, production and consumption, (iii) implementing a dynamic locally specific agricultural technology, and (iv) increasing efficiency in agribusiness system to produce competitive goods, which would bring welfare to both producers and consumers.

In line with the reforms in all sectors, the Ministry of Agriculture has set eight agriculture agendas of reforms, which is nothing but the shifting of paradigm into the one which will enable agriculture to play a central role in the national economic recovery. Focus of the agenda reforms is repositioning agriculture as an engine of economic growth and empowering farmers to articulate their aspiration and interest effectively.

With this agendas, the future direction of agriculture development will be maintaining food security and self sufficient on trend of rice, and integration of agriculture with processing industries in the framework of agribusiness. The utilization of advanced technologies and machineries in agriculture will be accelerated as efficiency and commodity competitiveness become key issues in agriculture development. In line with this direction, private sector will play a major role in agricultural development, including research and development, of agricultural technology adaptable to Indonesia's natural resource diversity.





Panen Perdana Gema Palagung 2001 di Jawa Barat



# DAFTAR ISI

**Kata Pengantar**

**Abstrak**

**2** **Pendahuluan**

**4** **Dinamika Lingkungan Strategis, Tantangan dan Peluang Pembangunan Pembangunan Pertanian**

4 **Dinamika Lingkungan Strategis**

8 **Tantangan dan Peluang**

**15** **Kebijakan Pembangunan Pertanian Era Reformasi**

15 **Peran Strategis Pertanian Dalam Pembangunan Nasional**

18 **Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Pertanian**

20 **Agenda Reformasi**

24 **Fokus Program Pembangunan**

**28** **Gerakan Mandiri Peningkatan Produksi**

29 **Gema Palagung 2001**

33 **Gema Hortina 2003**

37 **Gema Proteina 2001**

40 **Protekan 2003**

**43** **Langkah-Langkah Reformasi Pembangunan Pertanian**

43 **Pengembangan Prasarana dan Sarana Produksi**

45 **Pengembangan Pasar Produk**

46 **Deregulasi untuk Pengembangan Usaha dan Ekonomi Wilayah**

48 **Pemberdayaan Masyarakat Tani, Peternak dan Nelayan**

**53** **Hasil-Hasil Pembangunan Pertanian**

53 **Tanaman Pangan dan Hortikultura**

55 **Peternakan**

56 **Perikanan**

58 **Agribisnis**

59 **Pembinaan Sumberdaya Manusia**

**60** **Penutup**



---

## Pendahuluan

Dalam dua tahun terakhir ini, bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai tekanan secara beruntun yang diawali dengan musim kemarau yang panjang dan kebakaran hutan yang luas, kemudian disusul oleh krisis moneter yang berkepanjangan dan masih terus berdampak sampai saat ini. Semua hal tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakstabilan sosial ekonomi dan politik tetapi juga, yang lebih parah lagi, rentannya ketersediaan bahan pokok rakyat, termasuk bahan pangan. Dampak lanjut dari krisis moneter yang berkepanjangan adalah hampir semua sektor ekonomi yang mengandalkan komponen bahan baku dari impor mengalami kontraksi yang parah dan terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, terutama sektor industri dan manufaktur. Menurunnya daya beli masyarakat pada titik terendah akan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia generasi penerus.

Bangsa Indonesia telah menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar dari krisis ekonomi dan politik yang melanda negara saat ini ialah melaksanakan reformasi total. Reformasi yang dimaksud ialah pembaharuan, penyempurnaan dan penataan ulang seluruh pranata sosial ekonomi, politik dan hukum berdasarkan prinsip demokrasi dan transparansi untuk mewujudkan kemakmuran yang adil dan beradab. Dengan pengertian demikian, reformasi total akan berarti upaya penyempurnaan terhadap seluruh pranata pembangunan di seluruh sektor, termasuk sektor pertanian.

Seluruh komponen bangsa menyadari perlunya upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasi krisis ini. Melalui penyelenggaraan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998 telah dirumuskan acuan utama bagi penanganan masalah yang sedang dihadapi bangsa ini, antara lain dituangkan dalam Ketetapan MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang "*Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara*". Ketetapan MPR ini antara lain mengamankan Kebijakan Reformasi Pembangunan bidang ekonomi bertujuan untuk mengatasi krisis ekonomi



---

dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan sasaran terkendalinya (1) nilai kurs rupiah pada tingkat yang wajar, (2) tersedianya kebutuhan sembilan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau, dan (3) berputarnya roda perekonomian nasional.

Untuk melaksanakan Ketetapan MPR tersebut, diperlukan penjabaran ke dalam kebijakan dan langkah-langkah operasional berupa terobosan-terobosan yang sifatnya reformis sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Pembangunan pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, yang pelaksanaannya juga memerlukan reorientasi dan reformasi. Dalam konteks pembangunan nasional pada waktu lalu, sektor pertanian dipandang sebagai “pendukung” bukan sebagai “mesin penggerak” perekonomian. Sebagai sektor pendukung, maka sektor pertanian diposisikan sebagai: (a) pemasok bahan kebutuhan pangan dan bahan baku industri berharga murah, (b) pengendali stabilisasi harga, dan (c) pemasok tenaga kerja murah. Usaha pertanian dipandang sebagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan produksi yang tidak responsif terhadap perubahan kondisi pasar dan keragaannya lebih banyak dipengaruhi teknologi dan keadaan alam. Kondisi perekonomian makro maupun sektor riil lain seringkali dipandang tidak terkait erat dengan keragaan sektor pertanian, sehingga kebijakan makro pada umumnya tidak berpihak kepada sektor pertanian. Hal inilah yang menyebabkan adanya kecenderungan melemahnya kemampuan pertanian dalam mendukung ekonomi. Oleh karena itu, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk mengkaji kembali peran dan posisi pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional, sejalan dengan upaya reformasi di segala bidang kehidupan.

Oleh karena merupakan sektor yang keragaannya sangat mempengaruhi perikehidupan penduduk Indonesia secara umum, dan penduduk pedesaan serta lapisan terbawah secara khusus, maka reformasi di sektor pertanian harus dilakukan secara bertahap namun berkelanjutan. Pendekatan ini diyakini akan mengurangi dampak ikutan dari upaya reformasi agar tidak terjadi secara mendadak dan dalam skala besar, yang mungkin dapat menghambat proses reformasi pembangunan itu sendiri.

Buku ini membahas strategi dan kebijakan pembangunan pertanian dalam era reformasi, upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, dan perspektif pembangunan pertanian pada masa datang.



---

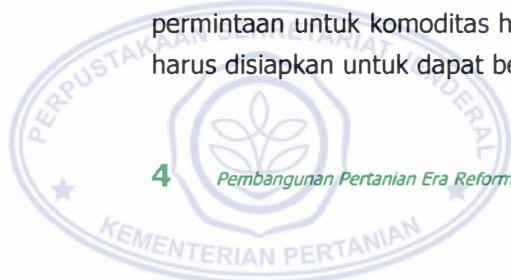
# Dinamika Lingkungan Strategis, Tantangan dan Peluang Pembangunan Pertanian

## DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS

### Internasional

Arus liberalisasi dan globalisasi ekonomi sebagai konsekuensi dari kesepakatan GATT/WTO (General Agreement on Tariff and Trade/World Trade Organization) yang ditopang oleh revolusi teknologi transportasi, telekomunikasi dan informasi telah membuat perekonomian setiap negara terintegrasi secara global. Liberalisasi ekonomi memaksa setiap negara membuka segala rintangan perdagangan dan investasi internasional serta menghapus segala proteksi dan subsidi bagi perekonomian domestiknya, namun wajib melindungi hak milik atas kekayaan material maupun hak cipta intelektual. Perpaduan antara liberalisasi ekonomi dan revolusi teknologi transportasi, telekomunikasi dan informasi telah mengaburkan batas-batas geografis antar negara sehingga setiap negara terintegrasi ke dalam suatu masyarakat dunia yang tanpa batas (*borderless world*). Dalam kondisi demikian, menciptakan kemandirian ekonomi adalah merupakan suatu tantangan besar, dan kemandirian ekonomi hanya dapat dipertahankan dengan memantapkan ketahanan ekonomi melalui peningkatan keunggulan kompetitif dan daya saing.

Selain itu, arus konvergensi budaya dan gaya hidup global mulai tampak sebagai akibat langsung dari munculnya "satu komunitas dunia". Hilangnya batas wilayah akan membuat penduduk setiap negara berinteraksi secara langsung dan intensif, sehingga kebudayaan dan gaya hidup mereka saling beradaptasi dan berubah menuju pada pola yang homogen. Hal ini akan membuat berubahnya pola perilaku masyarakat dalam berpikir, bersikap dan bertindak, termasuk dalam perilaku permintaan untuk komoditas hasil-hasil pertanian. Dalam kaitan ini sektor pertanian harus disiapkan untuk dapat bersaing secara global.



---

Secara umum, pertarungan global telah bergeser dari motif ekonomi ideologi ke motif penguasaan manfaat ekonomi, dari medan pertarungan angkatan perang ke persaingan pasar, dari strategi aliansi (blok) militer ke aliansi area perdagangan regional, dari ukuran ketangguhan supremasi militer ke keunggulan kompetitif. Ketahanan ekonomi dan ketahanan ideologi-budaya merupakan faktor kunci dalam menghadapi tantangan global pada masa kini dan lebih-lebih pada era milenium mendatang. Krisis ekonomi yang melanda negara-negara Asia dalam dua tahun terakhir merupakan contoh yang nyata betapa besarnya kekuatan ekonomi global mampu merusak tatanan ekonomi negara-negara berkembang yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Di tingkat regional juga terjadi perubahan peta politik dan perekonomian yang terus berkembang secara dinamis. Di lain pihak, dalam satu kawasan regional dengan kondisi agro ekosistem yang tidak banyak berbeda, produk-produk pertanian yang dihasilkan cenderung merupakan produk substitusi yang dekat. Dengan demikian produksi pertanian dari negara tetangga merupakan potensi pesaing bagi Indonesia dalam perdagangan komoditas pertanian di pasar dunia. Persaingan tersebut semakin tajam dengan munculnya blok dan perjanjian perdagangan regional seperti APEC, AFTA, MEE, NAFTA, serta blok-blok perdagangan lainnya .

Sementara itu, perubahan sosial, ekonomi dan politik global saling terkait dan saling mempengaruhi. Sejak terjadinya perubahan peta politik di Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur serta kawasan Balkan, diikuti dengan pudarnya komunisme dunia, dapat diidentifikasi dua hal kecenderungan kuat dalam tatanan pergaulan dunia, yang menunjukkan semakin dominannya peran negara-negara maju.

*Pertama*, ekonomi merupakan kekuatan baru yang sangat menentukan dalam politik internasional. Keterpurukan beberapa negara adidaya hampir selalu dimulai dengan memburuknya perekonomian di negara-negara tersebut. Bantuan negara-negara maju diberikan dengan syarat berdasarkan nilai-nilai yang secara dominan ditetapkan mereka. Hal ini dialami oleh negara-negara pengguna bantuan International Monetary Fund (IMF) dalam upaya pemulihan ekonomi pada saat krisis. Indonesia merasakan tekanan politik yang berat dari negara-negara maju sebagai syarat untuk memperoleh bantuan pemulihan ekonomi akibat krisis. Peran Badan dan Organisasi Dunia banyak ditentukan oleh negara-negara donor dan bias kepada kepentingan negara-negara yang perekonomiannya kuat.



---

*Kedua*, globalisasi ternyata tidak selalu menciptakan peluang tetapi juga menyebabkan kendala akses seperti yang dialami oleh negara-negara yang belum siap memasuki era globalisasi. Kondisi ini bertambah parah karena ternyata muncul bentuk proteksi baru yang legal dalam aturan perdagangan internasional, tetapi merupakan hambatan-hambatan teknis (*technical barriers*) bagi negara-negara sedang berkembang. Standar kualitas yang sangat tinggi yang ditetapkan oleh negara-negara pengimpor produk pertanian tidak mudah dipenuhi oleh negara-negara eksportir yang termasuk ke dalam kelompok negara berkembang.

Melihat situasi demikian, para pakar dan pemimpin bangsa menyadari bahwa pengembangan ekonomi harus bertumpu pada kekuatan dan keunggulan sumberdaya domestik. Dalam hal Indonesia, maka sektor pertanian yang berbasis sumberdaya domestik seyogyanya merupakan sektor andalan (*leading sector*) dalam pembangunan ekonomi nasional yang perlu didukung oleh sektor-sektor terkait.

## Domestik

Dinamika lingkungan strategis domestik yang diperkirakan sangat berpengaruh terhadap keragaan sektor pertanian di masa mendatang sangat banyak dan beragam intensitasnya. Pada dua tahun terakhir proses reformasi total sudah jelas akan juga berdampak pada pembangunan pertanian. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya diuraikan berikut ini.

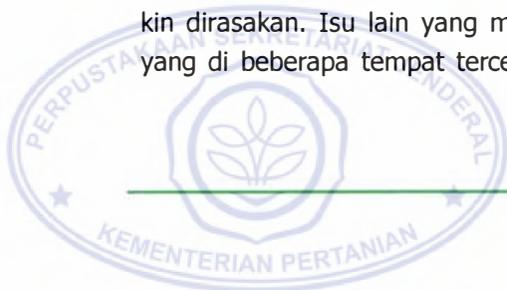
*Pertama* adalah dinamika sumberdaya manusia yang dicirikan oleh perubahan struktur demografis; ditinjau dari jumlah, komposisi umur, proporsi angkatan kerja, tingkat pendidikan dan struktur pendapatan. Dinamika tersebut akan sangat berpengaruh terhadap keragaan sektor pertanian di masa mendatang. Tiga hal utama yang merupakan dampak dari perubahan ini adalah :

- Meningkatnya permintaan terhadap produk pertanian, baik dalam jumlah, kualitas maupun keragamannya. Keadaan ini merupakan suatu peluang tetapi sekaligus tantangan pembangunan pertanian. Peningkatan permintaan mengandung arti ketersediaan pasar bagi produk pertanian, sehingga dapat ditinjau sebagai suatu peluang. Di sisi lain, peningkatan permintaan produk pertanian akan menimbulkan tekanan yang lebih besar untuk memacu peningkatan produksi dan kualitasnya. Ketidakmampuan meningkatkan produksi pertanian akan menimbulkan tekanan pada harga-harga hasil pertanian yang dapat mempengaruhi inflasi dan menimbulkan peningkatan kebutuhan impor yang akan menguras devisa.

- Meningkatnya ketersediaan tenaga kerja. Hal ini disamping dapat dilihat sebagai aset produktif untuk mendukung pembangunan pertanian, juga dapat menimbulkan masalah karena umumnya tenaga kerja yang berumur muda dan berpendidikan lebih tinggi tidak tertarik bekerja di sektor pertanian rakyat yang berskala kecil. Apabila sektor-sektor ekonomi secara terpadu tidak mampu menyediakan kesempatan kerja produktif bagi mereka, maka secara potensial akan menjadi masalah sosial-ekonomi yang rawan.
- Meningkatnya tekanan permintaan lahan untuk pemukiman penduduk. Proses ini akan semakin mempercepat konversi lahan pertanian untuk penggunaan non pertanian. Sementara itu, terjadi pula penurunan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan. Hal ini tentu akan membuat kapasitas produksi sektor pertanian semakin menurun. Lebih dari pada itu, harga lahan pun akan meningkat sehingga harga pokok komoditas pertanian semakin tinggi, yang tentunya akan menurunkan daya saingnya di pasar domestik dan internasional. Untuk mengatasi masalah ini pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas lahan merupakan salah satu strategi untuk mengatasinya.

*Kedua* adalah semakin terbatasnya ketersediaan sumberdaya alam bagi pembangunan pertanian. Luas lahan pertanian terus menurun akibat konversi untuk kegiatan industri, tapak pemukiman dan kegiatan ekonomi lainnya. Laju konversi lahan pertanian di Jawa jauh lebih cepat dibandingkan di luar Jawa. Terjadinya penurunan luas lahan pertanian tersebut, terutama di Jawa yang kondisi lahan pertaniannya lebih subur dan menjadi daerah basis tanaman pangan tentu akan berpengaruh pada kemampuan meningkatkan ketahanan pangan. Di pihak lain pencegahan laju penurunan luas lahan tersebut juga tidak mudah karena desakan kebutuhan lahan untuk pemukiman, infrastruktur dan industri.

Secara umum, tingkat pemanfaatan sumberdaya perairan yang terdiri dari perairan umum, perairan payau, lahan yang potensial untuk dikembangkan menjadi kolam, perairan laut teritorial, perairan ZEE, masih belum optimal. Pada beberapa wilayah, intensitas pemanfaatan sumberdaya perairan tersebut untuk perikanan telah cukup tinggi, namun banyak wilayah perairan lain yang pemanfaatannya masih rendah. Selain itu kompetisi pemanfaatan air semakin meningkat antara kebutuhan pertanian, industri, maupun rumah tangga sehingga kelangkaan air semakin dirasakan. Isu lain yang menyangkut air adalah berkaitan dengan kualitas air yang di beberapa tempat tercemar sehingga menjadi ancaman bagi kelangsungan



---

proses produksi pertanian. Gerakan hemat air dan isu kualitas air semakin menjadi perhatian berbagai kalangan ilmuwan dan praktisi.

*Ketiga* adalah perubahan tatanan sosial, budaya dan politik yang sangat cepat dan mendasar. Arus reformasi yang dimulai pada awal tahun 1998 telah membawa perubahan yang sangat fundamental pada nilai-nilai politik, budaya, dan sosial yang dianut masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut menimbulkan implikasi pada pelaksanaan pembangunan dalam beberapa hal:

- Makin meningkatnya tuntutan masyarakat agar pembangunan dilaksanakan secara transparan dan melibatkan secara intensif peran serta masyarakat.
- Sudah dimulainya desentralisasi dalam pembangunan, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaannya. Kebijakan ini sebagai respon adanya tuntutan agar aspirasi daerah dalam pembangunan hendaknya mendapat perhatian dan bahan pertimbangan utama.
- Makin mendesaknya tuntutan pemerataan pembangunan antar daerah dan antar golongan masyarakat. Tuntutan ini dikaitkan dengan pembagian yang adil pendapatan /keuangan antara pusat dan daerah berdasarkan kekayaan yang dimiliki daerah dan perlunya mengembangkan perekonomian yang berpihak pada rakyat (ekonomi kerakyatan).

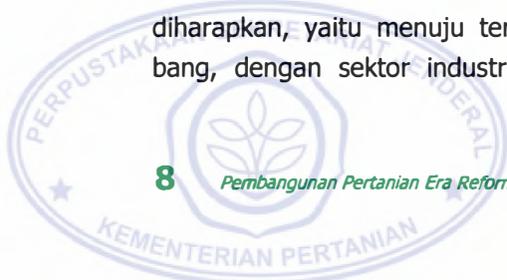
## TANTANGAN DAN PELUANG

### Tantangan

Untuk memainkan perannya sebagai suatu sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional, pembangunan pertanian dihadapkan pada berbagai tantangan sekaligus kendala yang sifatnya dinamis. Beberapa aspek yang penting dipahami bersama diantaranya diuraikan berikut ini.

#### *a. Transformasi Struktural*

Keberhasilan pembangunan pertanian dalam PJP I telah memberikan kesempatan tumbuh dan berkembangnya sektor industri dan jasa di pedesaan dan perkotaan. Arah transformasi struktur perekonomian ini telah berjalan seperti yang diharapkan, yaitu menuju terbentuknya struktur perekonomian yang lebih seimbang, dengan sektor industri dan jasa semakin besar perannya dalam Produk



Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, transformasi struktural tersebut belum disertai dengan transformasi struktur ketenagakerjaan. Sektor pertanian yang sudah semakin kecil secara relatif peranannya dalam PDB masih harus menopang bagian terbesar tenaga kerja nasional yang juga berarti menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini menyebabkan kesejahteraan masyarakat pertanian relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang bergerak di sektor non pertanian.

Gambaran tersebut tampaknya masih akan terus mewarnai pembangunan masa datang, walaupun pada masa krisis ini sektor industri mengalami pertumbuhan negatif. Keadaan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tenaga kerja antar sektor perekonomian masih akan terjadi, dan tenaga kerja di sektor pertanian akan terus memiliki pendapatan rendah. Karena itu salah satu tantangan yang dihadapi pembangunan pertanian adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan pendekatan pembangunan pertanian yang berorientasi agribisnis yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat pedesaan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk mekanisasi pertanian dan bioteknologi yang mampu meningkatkan daya saing produk pertanian.

**Tantangan Pembangunan Pertanian:**

- **Kecenderungan transformasi struktural perekonomian yang tak seimbang**
- **Pemenuhan kebutuhan pangan yang terus meningkat dalam jumlah, mutu, dan keragamannya**
- **Pemilikan lahan yang semakin sempit**
- **Pengembangan sumberdaya manusia pertanian yang handal dan terampil**
- **Pengembangan diversifikasi pertanian**
- **Kepedulian terhadap kelestarian dan kesehatan lingkungan**
- **Pengembangan kelembagaan pembangunan pertanian yang kondusif merespon tuntutan reformasi**

*b. Pemenuhan Kebutuhan Pangan*

Pangan merupakan kebutuhan pokok rakyat yang ketersediaannya, distribusinya serta tingkat harganya sangat berpengaruh terhadap stabilitas nasional, baik ekonomi maupun politik. Melalui berbagai upaya peningkatan produksi, swasembada beras telah mampu dicapai pada tahun 1984. Namun disadari pula, bahwa kemandapan swasembada tersebut masih rentan, terutama terhadap perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, serta gejolak pasar. Sementara itu, jumlah penduduk



---

sangat besar (210, 5 juta jiwa pada tahun 2000), pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi, serta tingkat konsumsi beras per kapita yang juga masih tinggi (sekitar 134 kg/tahun per kapita), menyebabkan permintaan terhadap pangan terus meningkat. Tingkat pendapatan masyarakat telah pula berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat yang semakin beragam, khususnya terjadi pada saat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sampai tahun 1996.

Pada sisi lain, laju produksi mengalami hambatan antara lain karena menyusutnya lahan pertanian produktif terutama di Jawa, yang pada kurun waktu 1983-1993 telah berkurang seluas 425.000 ha untuk lahan sawah dan 510.000 ha untuk lahan kering. Walaupun percepatan teknologi terus dipacu, namun kecenderungan terjadinya pelandaian (*levelling off*) dari pertumbuhan produktivitas usahatani padi semakin terasa. Oleh karena itu tantangan untuk mempertahankan swasembada pangan melalui peningkatan produksi, selain pada lahan-lahan irigasi dan lahan pertanian yang telah secara intensif dimanfaatkan melalui produktivitas, juga pada lahan-lahan alternatif seperti lahan-lahan rawa, gambut, dan lahan tidur. Di samping produksi dan pengadaan pangan dalam volume yang cukup, upaya meningkatkan ketahanan pangan mencakup pula aspek pengembangan diversifikasi dan penganeekaragaman pangan guna meningkatkan mutu pangan dan gizi masyarakat.

### *c. Pemilikan Lahan yang Semakin Sempit*

Sensus Pertanian 1993 menunjukkan bahwa jumlah petani dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 9,5 juta orang pada tahun 1983 menjadi 10,9 juta orang pada tahun 1993. Dengan pemilikan lahan rata-rata kurang dari 0,5 hektar dan tanpa adanya manajemen pengelolaan lahan yang memungkinkan tercapainya skala usaha, akan mengakibatkan usahatani menjadi kurang menarik secara ekonomis, karena tidak dapat memberikan jaminan sebagai sumber pendapatan yang mampu memberikan penghidupan yang layak.

Fragmentasi lahan telah mengakibatkan inefisiensi yang tinggi dalam usahatani dan kegiatan ekonomi terkait di sektor hilirnya. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi adalah menciptakan sistem kelembagaan pengelolaan lahan yang mampu menjamin petani memenuhi skala usaha yang efisien dalam menghasilkan produk-produk unggulan guna meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mereka. Dalam jangka panjang tantangannya adalah bagaimana menciptakan situasi kondusif agar terjadi konsolidasi penguasaan dan pengusahaan lahan oleh petani atau kelompok tani.



#### *d. Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian*

Pada akhir PJP I sekitar 46,2 persen tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, dengan skala usahatani kecil atau rata-rata pemilikan lahan 0,9 hektar, bahkan sekitar 9,6 juta rumah tangga memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar. Tingkat pendidikan tenaga kerja yang berkiprah di sektor ini masih rendah, yaitu sekitar 48,4 persen tidak pernah sekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar, dan 40,5 persen hanya menamatkan Sekolah Dasar. Dari aspek pengusahaannya, hanya sekitar 0,5 persen merupakan petani yang mempekerjakan buruh tetap, 15,2 persen petani tanpa ada bantuan dari orang lain, 33,1 persen petani sekaligus buruh tani, dan sisanya 51,2 persen merupakan buruh tani dan pekerja keluarga tidak dibayar. Sementara itu tenaga kerja muda produktif dan berpendidikan relatif tinggi di pedesaan banyak yang keluar dari sektor pertanian, walaupun pada tahun-tahun terakhir sudah mulai terlihat kecenderungan para pemuda berpendidikan tinggi memasuki kegiatan pertanian dalam arti luas. Pada saat krisis, penduduk kota yang bergerak di sektor informal kembali ke pedesaan. Walaupun mereka dapat ditampung oleh sektor pertanian, namun keahliannya sebagai petani sangat rendah. Hal ini menambah beban bagi pertanian dalam upayanya untuk mencapai efisiensi.

Kondisi yang demikian memberikan gambaran betapa rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja di pedesaan yang menyebabkan rendahnya efisiensi usahatani di pedesaan. Keadaan ini tentu tidak mendukung bagi pembangunan pertanian pada era reformasi ini. Tantangan ke depan adalah bagaimana mempersiapkan SDM pertanian dengan kondisi tersebut agar mampu menerapkan teknologi pertanian dalam kegiatan usaha pertaniannya.

#### *e. Pengembangan Diversifikasi Pertanian*

Dari sisi pemanfaatan sumberdaya, selama ini masih banyak perhatian dicurahkan pada produksi komoditas pangan pokok. Perhatian untuk komoditas pangan lain, peternakan, perikanan dan komoditas non-pangan komersial masih belum memadai. Untuk lebih meningkatkan pendapatan petani dan memperluas kesempatan kerja produktif di pedesaan, maka diversifikasi pertanian perlu terus ditingkatkan. Kebijakan ini diharapkan juga mempunyai dampak positif dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan dan masalah degradasi lingkungan.

Seperti halnya dalam revolusi hijau untuk pengembangan produksi pangan, kunci sukses diversifikasi adalah pengembangan teknologi disertai dengan pengembangan kelembagaan pendukung yang memadai. Diversifikasi diharapkan



---

berkembang bukan hanya dalam kegiatan produksi tetapi juga dalam pemasaran dan pengolahan hasil. Dengan pengembangan produksi pada kawasan yang memenuhi skala ekonomi, maka simpul-simpul usaha yang melayani sarana produksi, pemasaran, pengolahan maupun jasa pelayanan diharapkan ikut berkembang. Kegiatan tersebut seyogyanya tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah, tetapi dengan seluas mungkin memberikan kesempatan kepada swasta. Kewajiban pemerintah adalah memberikan kondisi kondusif antara lain dalam membangun prasarana, informasi pasar, standarisasi produk, penyediaan teknologi spesifik lokasi, pelatihan dan penyuluhan.

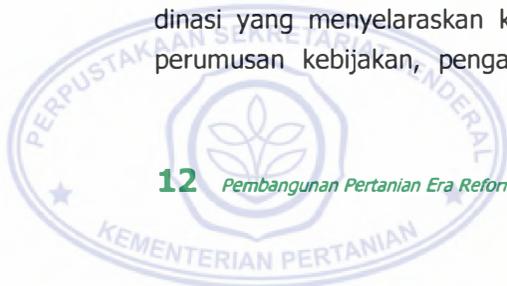
*f. Kepedulian terhadap Kelestarian dan Kesehatan Lingkungan*

Sektor pertanian dihadapkan pada kondisi sumberdaya alam yang semakin terbatas dan dengan kualitas yang semakin menurun. Kerusakan lingkungan di daerah pantai, kuantitas dan kualitas air sungai maupun air tanah yang semakin rendah, kerusakan terumbu karang, polusi udara dan lain-lain merupakan kondisi yang menyertai pembangunan pertanian saat ini dan masa datang. Sementara itu, gerakan peduli lingkungan yang berkembang semakin meluas terutama di negara-negara maju telah mengakibatkan perubahan besar dalam kebijakan produksi pertanian di seluruh dunia. Persyaratan mutu produk dalam perdagangan internasional tidak hanya terkait dengan keamanan produk bagi konsumen tetapi juga dengan dampak dari proses produksi tersebut terhadap kelestarian dan kesehatan lingkungan.

Kepedulian pemerintah terhadap lingkungan terlihat dari munculnya berbagai kebijakan dalam penanganan limbah, persyaratan investasi, dan proses produksi. Secara keseluruhan, perkembangan kepedulian lingkungan ini perlu disertai dengan penataan yang sebaik-baiknya dalam hal kebijakan dan peraturan perundangan agar proses produksi dapat dilakukan dengan mengacu pada kelestarian lingkungan, tetapi tetap dijalankan secara efisien guna meningkatkan daya saing.

*g. Kelembagaan Pembangunan Pertanian*

Agribisnis meliputi kegiatan usaha dari mulai penyediaan sarana produksi, kegiatan produksi usaha tani, pengolahan dan pemasaran. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berbeda dan terpecah pada wilayah yang luas. Untuk dapat berlangsungnya kegiatan agribisnis komoditas, diperlukan mekanisme koordinasi yang menyelaraskan kegiatan pada setiap subsistem di atas. Selama ini, perumusan kebijakan, pengaturan dan pembinaan berbagai subsistem tersebut



berada pada instansi yang berbeda yang dalam prakteknya satu sama lain tidak selalu sejalan. Untuk mewujudkan adanya kesepakatan tersebut, Departemen Pertanian hendaknya mendapat wewenang sebagai departemen pemimpin, dalam merumuskan langkah kebijakan dan implementasinya, dengan dukungan dari berbagai lembaga/instansi terkait.

## Peluang

Untuk mewujudkan sektor pertanian sebagai sektor andalan atau motor penggerak pembangunan, berbagai peluang masih terbuka dengan sangat lebar. Peluang-peluang ekonomi yang dapat dijadikan sumber pertumbuhan baru dan merupakan peluang dalam meningkatkan usaha pertanian antara lain:

- Masih terdapat kesenjangan antara produktivitas riil di tingkat usahatani dan produktivitas potensial komoditas pertanian yang berkisar antara 20-100 persen, sehingga peningkatan produktivitas masih dapat dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan IPTEK, khususnya IPTEK pertanian yang spesifik lokasi.
- Masih tersedia areal pertanian dan lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal seperti lahan rawa gambut dan pasang surut serta peningkatan intensitas pertanaman (IP) pada lahan beririgasi. Untuk subsektor perikanan belum seluruh potensi kelautan dan daerah perairan dimanfaatkan secara optimal. Potensi sumberdaya ini perlu dirancang dengan baik pemanfaatannya untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat pertanian.
- Kehilangan hasil dan kerusakan pasca panen hasil-hasil pertanian masih cukup tinggi, yaitu sekitar 5-15 persen. Kehilangan hasil ini perlu ditekan dalam upaya peningkatan produksi melalui perbaikan teknologi panen dan pasca panen.

### **Peluang Pembangunan Pertanian:**

- **Peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan Iptek tepat guna dan spesifik lokasi**
- **Peningkatan optimasi pemanfaatan sumberdaya alam (lahan, perairan, kelautan)**
- **Penurunan proporsi kehilangan hasil panen melalui perbaikan teknologi panen dan pascapanen**
- **Peningkatan daya saing komoditas melalui perbaikan mutu dan standarisasi produk pertanian**
- **Pengembangan diversifikasi produk dengan memanfaatkan teknologi pengolahan hasil**
- **Penggalakan promosi investasi pertanian/agribisnis yang terbukti sangat lentur dalam menghadapi krisis ekonomi**

- 
- Sebagian besar produk pertanian masih berkualitas rendah sehingga memperlemah daya saing produk baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri. Pembinaan bagi peningkatan kualitas dan standarisasi produk pertanian dapat dipandang sebagai kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
  - Penggunaan produk pertanian semakin beragam, tidak saja untuk konsumsi pangan secara langsung dan ekspor tetapi juga sebagai bahan baku industri, termasuk pakan ternak. Diversifikasi penggunaan produk mendorong peningkatan permintaan terhadap produk-produk olahan pertanian yang dapat meningkatkan nilai tambah dan perputaran roda perekonomian nasional.
  - Akibat krisis ekonomi terjadi kontraksi ekonomi yang dialami oleh berbagai sektor yang menyebabkan banyak usaha/perusahaan di bidang industri yang mengalami kemunduran bahkan kebangkrutan, sementara pertanian muncul sebagai sektor yang dapat menghela ekonomi nasional. Hal ini merupakan peluang bagi sektor pertanian dengan pendekatan agribisnis untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di sektor pertanian/agribisnis, mengajak masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan pertanian dan menyadarkan berbagai kalangan mengenai pentingnya pertanian sebagai sektor penggerak pembangunan ekonomi nasional.



---

# Kebijakan Pembangunan Pertanian Era Reformasi

## PERAN STRATEGIS PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

### Peran Pertanian Selama Ini

Secara umum pada periode Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) sektor pertanian dinilai telah berhasil melaksanakan peran-peran konvensionalnya, seperti menghasilkan bahan pangan bagi penduduk, menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, menyediakan input bagi sektor industri, membentuk modal investasi untuk pembangunan sektor-sektor lainnya, dan menghasilkan devisa melalui ekspor.

Sejalan dengan tahapan dan keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai selama lebih dari 30 tahun yang tumbuh rata-rata 7 persen per tahun, proses transformasi struktural perekonomian nasional berjalan secara berkelanjutan dan mengarah kepada struktur ekonomi berimbang. Gejala ini ditunjukkan dengan semakin menurunnya pangsa relatif sektor-sektor primer termasuk sektor pertanian dan meningkatnya pangsa relatif sektor-sektor sekunder dan tertier dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, penurunan pangsa PDB sektor pertanian tidak diikuti secara berimbang dengan penurunan pangsa penyerapan tenaga kerja. Hal ini berakibat semakin rendahnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian dibandingkan dengan produktivitas tenaga kerja sektor lainnya.

Sektor pertanian telah memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan sektor-sektor sekunder dan tertier, melalui harga pangan murah; dimana pangan merupakan komoditas penentu tingkat upah. Karena pangan merupakan komponen utama dari pengeluaran yang menentukan tingkat upah pada sektor sekunder dan tertier, maka kebijakan menyediakan pangan murah menjadikan sektor-sektor tersebut dapat memanfaatkan tenaga kerja dengan upah rendah sehingga dapat tumbuh lebih pesat.



Peranan sektor pertanian dalam pembentukan dan pengembangan kelembagaan pedesaan kiranya tidak dapat dianggap kecil. Pembinaan kelembagaan dengan azas wilayah produksi sehamparan yang dimulai pada PJP I menjadi cikal bakal perkembangan satuan kelembagaan agribisnis di kemudian hari. Disamping itu pembinaan kelompok-kelompok tani dapat pula dilihat sebagai suatu upaya mengintegrasikan pendekatan regional dengan pendekatan sektoral. Namun demikian, dengan adanya keharusan pengembangan satu bentuk koperasi di pedesaan yang seringkali keberadaannya dipaksakan, kemandirian petani dan kelompok tani untuk melaksanakan usahanya dengan prinsip-prinsip bisnis tidak dapat terbina dengan baik.

Kegiatan pembangunan pertanian terutama di wilayah pedesaan telah pula memberikan andil yang besar dalam upaya memerangi kemiskinan. Jumlah relatif penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan dilaporkan secara konsisten terus menurun, baik secara absolut maupun persentase. Namun demikian, karena krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997-1998, maka hasil jerih payah ini secara drastis tersapu sehingga pedesaan kembali menjadi kantong-kantong kemiskinan, terutama dengan adanya de-urbanisasi penduduk perkotaan yang tadinya bergerak di sektor informal. Namun demikian, dalam suasana krisis ekonomi ini, pertanian telah berperan sebagai katup pengaman. Secara nasional, sektor ini masih dapat tumbuh positif, dan secara regional sektor ini diminta menampung tambahan tenaga kerja yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan pengalaman pahit pada masa krisis , dapat dicermati bahwa walaupun secara langsung pembangunan pertanian selama ini telah melibatkan dan memberdayakan masyarakat sampai lapisan terbawah, namun beberapa hal kiranya perlu ditinjau kembali, di antaranya yaitu:

- Kebijakan makro yang mengarah kepada tersedianya pangan murah dan tenaga kerja yang murah ternyata tidak dapat memfasilitasi pertumbuhan produktivitas yang baik bagi sektor pertanian, dan khususnya bagi sebagian besar masyarakat yang bergantung pada subsektor tanaman pangan;
- Pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis selama ini kurang mendapatkan dukungan yang cukup sehingga perkembangannya relatif jauh tertinggal dibandingkan dengan sektor industri lainnya maupun dengan pertanian di negara lain;



- Untuk memacu pencapaian sasaran pembangunan nasional, perencanaan program, kegiatan dan pembiayaan lebih banyak ditentukan oleh pusat, sedangkan keterlibatan pihak daerah dan masyarakat berpartisipasi dalam program-program tersebut masih terbatas. Pendekatan ini mempunyai kelebihan, khususnya dalam hal mempercepat proses pertumbuhan dimana sumberdaya manusia di berbagai daerah dipandang masih belum siap, namun juga mempunyai kelemahan, terutama karena kurangnya mengakomodasikan partisipasi dan inisiatif masyarakat, yang sangat beragam daya fikir dan kekuatan sosial ekonominya.

## Peran Pertanian pada Era Reformasi

Sektor pertanian memegang peran strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, dan bahkan dalam era reformasi ini diharapkan untuk berperan di garis depan dalam mengatasi krisis ekonomi. Peran strategis sektor pertanian sehingga sektor ini patut menjadi sektor andalan dan mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai berikut.

*Pertama*, sektor pertanian merupakan tumpuan hidup bagi sebagian besar penduduk Indonesia, karena hampir setengah dari angkatan kerja di Indonesia bekerja di sektor ini. Hal ini berarti upaya menghapus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia akan lebih efektif dilakukan melalui pembangunan pertanian. Namun demikian, pada era reformasi ini pendekatan pembangunan pertanian dalam hal ketenagakerjaan bukan lagi penciptaan lapangan kerja dari sisi kuantitas saja, tetapi diarahkan pada penciptaan lapangan kerja produktif yang mampu memberikan upah atau imbalan pendapatan yang layak dan sebanding dengan sektor-sektor lainnya.

*Kedua*, sektor pertanian merupakan penghasil bahan makanan pokok, sementara itu ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya ketahanan ekonomi maupun ketahanan politik. Dalam kondisi perekonomian global maupun domestik yang tidak stabil maka ketahanan pangan yang paling mantap ialah melalui pencapaian swasembada. Oleh karena itu, peningkatan produksi pangan untuk mewujudkan, memulihkan, dan mempertahankan swasembada merupakan upaya strategis untuk memantapkan ketahanan pangan dan sekaligus ketahanan nasional.

*Ketiga*, sektor pertanian masih tetap menempati posisi penting sebagai penyumbang produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan nasional. Lebih dari itu, sektor pertanian memiliki keunggulan khas dari sektor-sektor lain dalam perekonomian,



---

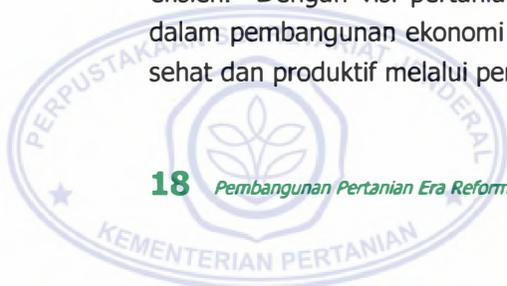
antara lain: (a) produksi pertanian berbasis pada sumberdaya domestik, kandungan impornya rendah dan relatif lebih tangguh menghadapi gejolak perekonomian eksternal, dan (b) produk pertanian yang berbasis sumberdaya alam relatif lebih tangguh menghadapi gejolak ekonomi makro, seperti gejolak moneter, nilai tukar maupun fiskal. Dengan demikian, upaya mempertahankan dan meningkatkan peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Hal ini telah terbukti dari fakta empiris, di saat Indonesia menghadapi krisis dan secara nasional mengalami laju pertumbuhan ekonomi negatif, hanya sektor pertanianlah yang tumbuh positif.

*Keempat*, sektor pertanian merupakan penyumbang devisa yang relatif besar dan ternyata cukup lentur dalam menghadapi gejolak moneter dan krisis ekonomi. Oleh karena produksinya berbasis pada sumberdaya domestik maka ekspor produk pertanian relatif lebih tangguh yang terbukti dengan ekspor pertanian yang relatif stabil dengan penerimaan ekspor yang meningkat pesat pada saat krisis ini. Tersedianya devisa yang cukup merupakan syarat keharusan untuk dapat mengimpor barang produksi dan untuk mempertahankan stabilitas kurs rupiah. Dengan demikian, melalui sumbangan devisa yang relatif besar dan stabil, sektor pertanian telah berperan positif dalam memantapkan ketahanan ekonomi nasional.

## VISI, MISI DAN TUJUAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Untuk melaksanakan peran strategis sebagaimana diuraikan di atas, sektor pertanian berupaya untuk terus memperbaiki kinerja pembangunannya. Pembangunan pertanian diartikan sebagai rangkaian berbagai upaya untuk mengembangkan kapasitas masyarakat pertanian, khususnya memberdayakan petani, peternak dan nelayan, agar mampu melaksanakan kegiatan ekonomi produktif secara mandiri dan selanjutnya mampu memperbaiki kehidupannya sendiri. Pemerintah melaksanakan perannya sebagai stimulator dan fasilitator yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial para petani, peternak dan nelayan, agar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk mewujudkan peran tersebut visi, misi dan tujuan yang jelas dirumuskan berikut ini.

Visi pertanian memasuki abad 21 adalah pertanian moderen, tangguh dan efisien. Dengan visi pertanian seperti tersebut, maka visi Departemen Pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional adalah untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif melalui pembangunan pertanian yang selaras dengan alam.



Untuk mewujudkan visi pertanian tersebut, misi pembangunan pertanian adalah memberdayakan petani, peternak dan nelayan menuju suatu masyarakat tani yang mandiri, maju, sejahtera dan berkeadilan. sejalan dengan visi tersebut, misi Departemen Pertanian adalah:

- 1) Mengamankan ketersediaan pangan dan hasil-hasil pertanian lainnya secara berkelanjutan dalam upaya memantapkan ketahanan pangan nasional.
- 2) Menciptakan peluang ekonomi bagi pengembangan agribisnis dan ekonomi pedesaan dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani dan penduduk pedesaan.
- 3) Melestarikan sumberdaya alam dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan.
- 4) Memberdayakan sumberdaya manusia pertanian agar mampu berperan dalam era global.
- 5) Mengembangkan teknologi pertanian strategis, spesifik lokasi, dan ramah lingkungan.
- 6) Menyelaraskan saling ketergantungan kegiatan pertanian antar wilayah dan antar sektor menuju terciptanya struktur ekonomi nasional yang handal.

Wujud pertanian seperti itu akan dapat dicapai melalui program-program pembangunan pertanian dengan strategi:

- 1) Meningkatkan optimasi pemanfaatan sumberdaya domestik, yang merupakan modal dasar pembangunan yang sangat berharga dan mempunyai potensi yang sangat besar. Keunggulan dari kekayaan sumberdaya domestik ini telah teruji, baik pada saat krisis maupun dalam keadaan normal. Sumberdaya domestik yang dimiliki yaitu lahan, air, plasma nutfah, tenaga kerja, modal dan teknologi.

**Visi Pertanian:**

**Pertanian moderen, tangguh, dan efisien**

**Misi Pembangunan Pertanian:**

**Memberdayakan petani, peternak, dan nelayan menuju suatu masyarakat tani yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan**

**Strategi mewujudkan visi dan misi:**

- **Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya domestik**
- **Memperluas spektrum pembangunan pertanian (diversifikasi pertanian)**
- **Menerapkan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi**
- **Meningkatkan efisiensi sistem agribisnis dengan penerapan Iptek**



- 
- 2) Memperluas spektrum pembangunan pertanian melalui diversifikasi teknologi, sumberdaya, produksi dan konsumsi. Melalui upaya ini, keragaman sumberdaya, tahapan kemajuan pembangunan, serta kondisi sosial-budaya di setiap wilayah dijadikan referensi dalam setiap upaya pengembangan wilayah tersebut, sehingga dicapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan harmonis.
  - 3) Meningkatkan penerapan rekayasa teknologi pertanian spesifik lokasi dan tepat guna. Teknologi yang diterapkan tidak harus selalu hasil dari karya penelitian lingkup Departemen Pertanian saja, tetapi juga dari lembaga lainnya, baik pemerintah ataupun swasta, dan baik dari dalam negeri, ataupun internasional. Melalui pendekatan ini percepatan pembangunan pertanian yang didukung oleh pemanfaatan teknologi akan dapat diwujudkan.
  - 4) Meningkatkan efisiensi sistem agribisnis untuk meningkatkan produksi pertanian dengan kandungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan berdaya saing tinggi, sehingga memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani sebagai produsen dan masyarakat konsumen secara berimbang.

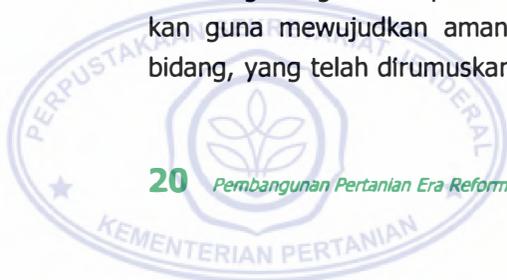
Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan pembangunan pertanian pada era reformasi terfokus kepada upaya untuk:

- 1) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak dan nelayan.
- 2) Meningkatkan ketahanan pangan nasional.
- 3) Menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi untuk mengisi pasar domestik dan ekspor.
- 4) Menyediakan lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha yang efisien di bidang agribisnis.
- 5) Meningkatkan kemandirian petani-nelayan dan pemberdayaan kelembagaan serta prasarana pertanian

## AGENDA REFORMASI

### Penjabaran Ketetapan MPR 1998 Hasil Sidang Istimewa

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan pertanian dilaksanakan guna mewujudkan amanat rakyat untuk melaksanakan reformasi di segala bidang, yang telah dirumuskan melalui Sidang Istimewa MPR. Ketetapan MPR hasil



---

Sidang Istimewa No. X/MPR/1998, memuat amanat untuk memulihkan kembali perekonomian nasional yang sedang terpuruk dalam periode waktu yang singkat. Dari berbagai butir agenda kebijakan bidang ekonomi yang dirumuskan dalam Ketetapan MPR No. X/MPR/1998, butir-butir yang langsung terkait dengan tugas dan fungsi Departemen Pertanian adalah (sesuai dengan bunyi dalam Ketetapan tersebut):

- Menyediakan sembilan bahan pokok dan obat-obatan yang cukup dan terjangkau oleh rakyat, baik melalui peningkatan produksi dalam negeri maupun impor. Golongan miskin, khususnya yang tidak memiliki daya beli, menjadi prioritas utama melalui kebijakan subsidi yang terarah. Kebijakan dan program diversifikasi pangan diperluas sehingga dapat mengurangi ketergantungan pangan rakyat hanya kepada beras.
- Menghidupkan kembali kegiatan produksi, terutama kegiatan-kegiatan yang berbasis pada ekonomi rakyat dan berorientasi ekspor, sebagai dasar untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat.
- Mendayagunakan potensi ekonomi dari sumberdaya alam khususnya sumberdaya kelautan termasuk pengamanannya untuk meningkatkan ekspor.
- Melaksanakan deregulasi ketetapan-ketetapan yang menghambat investasi, produksi, distribusi dan perdagangan.
- Melakukan penyelamatan sosial melalui program-program khusus bagi mereka yang putus kerja, yang mengalami hambatan usaha dan mencegah laju pengangguran terbuka serta laju kemiskinan.

Sedangkan butir-butir Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang "*Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumberdaya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan RI*", yang terkait dengan pembangunan pertanian adalah :

- Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional.
- Pengelolaan sumberdaya alam secara efektif dan efisien dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah dan koperasi.
- Peningkatan kemitraan yang saling menguntungkan antara petani/ pengusaha kecil dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan demokratisasi ekonomi.



- 
- Pemberian prioritas dukungan kepada pengusaha ekonomi lemah.
  - Tanah sebagai basis pertanian digunakan untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi petani-nelayan kecil.

## Reorientasi dan Agenda Reformasi

Sejalan dengan perkembangan aspirasi masyarakat, sejak awal 1990-an mulai muncul pemikiran-pemikiran yang progresif untuk melaksanakan reorientasi pendekatan pembangunan pertanian. Beberapa butir reorientasi pendekatan pembangunan yang mulai diterapkan secara gradual dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian sejak Repelita VI diantaranya, adalah:

- Perubahan pendekatan perencanaan pembangunan dari dominasi perencanaan terpusat menjadi lebih terdesentralisasi, dalam upaya untuk menjamin pembangunan partisipatif, optimasi pemanfaatan sumberdaya yang beragam dan pencapaian pembangunan daerah yang lebih merata.
- Perubahan orientasi pembangunan dari pendekatan produksi menjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani
- Perubahan penekanan pengembangan produk dari upaya menghasilkan produk pertanian primer kepada produk-produk olahan yang dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat pedesaan, melalui pengembangan agribisnis di pedesaan
- Perubahan dari pemanfaatan teknologi padat tenaga kerja mengarah pada penerapan teknologi padat modal dan mekanisasi pertanian dalam upaya untuk mencapai efisiensi usaha dan daya saing komoditas.
- Perubahan dari dominasi peran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan mengarah pada peningkatan peran masyarakat dan swasta

Dengan terjadinya reformasi pada berbagai bidang yang mendapatkan momentum pada bulan Mei 1998, tentunya reorientasi pendekatan pembangunan pertanian di atas tetap relevan dan dapat senantiasa disempurnakan agar pembangunan pertanian sejawa dengan semangat reformasi yang kini tengah bergulir secara nasional. Sehubungan dengan itu, dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan pertanian, telah dirumuskan delapan agenda reformasi pembangunan pertanian sebagai berikut:



- 1) Menciptakan sektor pertanian menjadi sektor andalan dan mesin penggerak ekonomi nasional melalui peningkatan produktivitas, efisiensi dan kualitas. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, dilaksanakan koordinasi untuk memperoleh dukungan kebijakan ekonomi makro yang kondusif, baik berupa kebijakan fiskal, moneter maupun perdagangan.
- 2) Membangun pertanian dengan keberpihakan kepada petani, peternak dan nelayan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemandiriannya sebagai subyek pembangunan, agar mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
- 3) Mempertajam implementasi misi pembangunan pertanian dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Selama ini sektor pertanian sarat dibebani oleh berbagai misi pencapaian sasaran pembangunan.
- 4) Meningkatkan keberdayaan petani dan kelembagaan kelompok tani agar mampu secara efektif mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan petani. Adanya organisasi petani yang kuat merupakan faktor kunci agar kepentingan petani dapat lebih diakomodasikan dalam kebijakan pembangunan. Organisasi tersebut merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis masalah dan menentukan secara rasional kegiatan pembangunan pertanian yang tepat bagi mereka.
- 5) Membangun pertanian dan aparat pertanian untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, khususnya petani dan nelayan, sehingga dapat menumbuhkan iklim kondusif bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pertanian.
- 6) Mendukung proses demokratisasi dalam pembangunan pertanian melalui langkah revitalisasi kelembagaan dan aparat pertanian di daerah, percepatan pelaksanaan otonomi di bidang pertanian dengan menerapkan perencanaan wilayah sebagai dasar penentuan kegiatan pembangunan pertanian.
- 7) Meningkatkan keterkaitan subsistem produksi pertanian dengan subsistem lainnya (prasarana, pengolahan, pemasaran/distribusi) dalam kerangka pengembangan agribisnis.
- 8) Mempertajam orientasi dan arah pengembangan komoditas pertanian dengan mengacu pada dinamika pasar, produk unggulan berdaya saing tinggi, berwawasan lingkungan dan terintegrasi dengan sektor dan sub-sistem ekonomi lainnya.



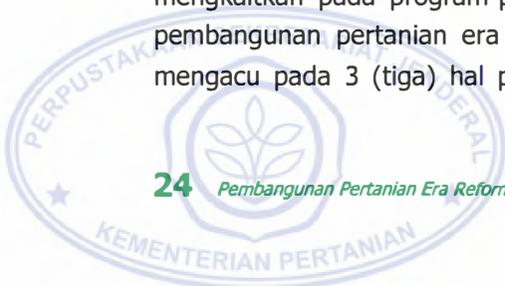
---

## FOKUS PROGRAM PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pelaku utama pembangunan adalah petani, peternak, dan nelayan yang jumlahnya berjuta-juta dengan penguasaan sumberdaya yang relatif terbatas. Peran mereka dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional sangat vital, terutama dalam pencapaian ketahanan pangan nasional. Karena itu kebijakan, strategi, dan program pembangunan pertanian dirancang dengan pendekatan pemberdayaan mereka agar mampu mandiri dalam melaksanakan usaha pertaniannya serta dijiwai oleh keberpihakan pada kepentingan petani. Dengan demikian tujuan akhir dari pembangunan pertanian adalah meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan para petani, peternak, dan nelayan.

Pencapaian tujuan akhir tersebut, yaitu meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani, dapat dilakukan melalui (a) peningkatan produksi dan produktivitas dan (b) mengkondisikan pasar agar dapat menentukan harga yang wajar bagi produk-produk pertanian. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas dilaksanakan dengan meningkatkan efisiensi usaha melalui penerapan teknologi petani tepat guna dan spesifik lokasi. Upaya agar petani mendapat harga yang wajar ditera dengan nilai tukar petani (NTP) yang seyogianya harus semakin membaik. Untuk itu diperlukan penyempurnaan dalam kebijakan harga produk dan input pertanian, peningkatan efisiensi pemasaran, perbaikan prasarana dan sarana distribusi hasil pertanian, penyediaan informasi harga dan pasar, dan peningkatan kemampuan petani dalam pengembangan mutu produk. Peran Departemen Pertanian akan sangat vital dalam mewujudkan hal-hal di atas dan upaya koordinasi lintas sektoral sangat penting, mengingat sebagian dari hal-hal di atas terkait erat dengan atau bahkan ditentukan oleh departemen lain.

Implementasi dari konsep, strategi dan kebijakan pembangunan pertanian era reformasi berupa program-program pembangunan pertanian yang mencerminkan keberpihakan kepada petani dan yang mampu memberdayakan petani. Kerangka program pembangunan yang berlaku saat ini (rumusan dari Repelita VI) sudah kurang cocok dengan rumusan-rumusan di atas, sehingga perlu ada konsep baru. Namun saat ini kesepakatan nasional mengenai struktur program-program pembangunan pertanian tersebut belum ada. Sehubungan dengan itu, dengan mengkaitkan pada program-program pembangunan yang berlaku saat ini, fokus pembangunan pertanian era reformasi dalam jangka pendek sampai menengah mengacu pada 3 (tiga) hal pokok, yaitu (a) peningkatan ketahanan pangan, (b)



---

pengembangan ekonomi rakyat (petani, peternak, nelayan) dan (c) peningkatan ekspor dan substitusi impor.

## Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional

Ketahanan pangan diartikan sebagai tersedianya bahan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu untuk menopang aktivitas sehari-harinya sepanjang waktu pada harga yang terjangkau. Dengan demikian, dalam pengertian kebijakan operasional, ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, aksesibilitas (keterjangkauan) dan stabilitas pengadaannya. Peningkatan ketahanan pangan menjadi salah satu fokus pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar, kualitas pangan yang dikonsumsi akan menentukan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa, keterkaitan pangan kedepan dan kebelakang dalam pertumbuhan ekonomi nasional sangat tinggi, dan ketahanan pangan mempunyai pengaruh yang erat pada ketahanan nasional.

Dari sisi pasokan atau produksi, fokus upaya pencapaian ketahanan pangan dilaksanakan dalam bentuk:

- peningkatan produksi beras untuk meraih kembali swasembada beras secara nasional.
- peningkatan produksi komoditas palawija, khususnya jagung dan kedelai guna mendukung pengembangan industri pakan domestik dan pengolahan pangan sumber protein nabati
- peningkatan produksi perikanan, peternakan dan hortikultura utama untuk meningkatkan keanekaragaman, keseimbangan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
- peningkatan pengembangan pangan lokal di masing-masing wilayah dan pengembangan kemampuan masyarakat dalam pengolahan pangan untuk mempercepat proses diversifikasi konsumsi pangan.

Keseluruhan fokus kegiatan di atas diupayakan dengan memberdayakan para petani, peternak dan nelayan agar mampu mengembangkan usahataniya, melalui upaya pengembangan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia pertanian, memfasilitasi pengadaan sarana produksi dan modal kerja, perumusan kebijakan harga dan insentif berproduksi agar mampu berproduksi secara efisien, dan mendorong percepatan diversifikasi pangan ke arah non beras dan peningkatan kualitas konsumsi gizi.



---

## Pengembangan Ekonomi Petani, Peternak, dan Nelayan

Pengembangan ekonomi rakyat di sektor pertanian, yaitu petani, peternak dan nelayan mempunyai justifikasi yang sangat kuat. *Pertama*, para pelaku ekonomi pertanian adalah para pengusaha skala kecil dengan basis ekonomi rakyat, yang tersebar berjuta-juta usaha di seluruh Wilayah Nusantara. Usaha pertanian skala kecil ini secara individu seringkali dicirikan oleh inefisiensi dalam pengelolaan faktor produksi, lemah dalam permodalan, dan kurang mampu dalam menjangkau pelayanan yang disediakan pemerintah atau dunia usaha. Di pihak lain, usaha kecil pertanian merupakan penopang ekonomi pedesaan dan sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat pedesaan.

*Kedua*, sektor pertanian Indonesia yang sebagian besar ditopang usaha kecil dan menengah telah terbukti mempunyai daya tahan yang sangat lentur dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi beberapa kali, pada dekade 1960-an, 1970-an dan 1990-an. Faktor utama yang menopang ketahanan pertanian ini karena sektor ini didukung oleh kekayaan sumberdaya domestik, yang menciptakan struktur biaya produksi dengan kandungan sumberdaya domestik/lokal yang tinggi.

*Ketiga*, pemberdayaan usaha kecil dan menengah merupakan kehendak rakyat yang diformulasikan dalam Ketetapan MPR No. XV/1998. Dalam Ketetapan MPR tersebut dikemukakan bahwa prioritas dukungan diberikan kepada pengusaha ekonomi lemah dan pengelolaan sumberdaya alam diberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil, menengah dan koperasi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk pengembangan ekonomi petani, peternak dan nelayan diantaranya adalah:

- meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha pertanian tidak hanya terbatas pada aspek produksi (budidaya), tetapi juga pada aspek agribisnis secara keseluruhan, termasuk ketrampilan manajerial, melalui penyuluhan dan pengkajian teknologi spesifik lokasi,
- mengembangkan kemampuan petani untuk bekerja sama dalam bentuk kelompok tani maupun koperasi pertanian,
- mengembangkan sistem pemasaran yang efisien dan praktek bisnis yang berorientasi pasar, mengembangkankelompok lembaga informasi pertanian, dan membina pengembangan mutu produk,



- mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara petani/pengusaha kecil dengan pelaku usaha menengah dan besar untuk mewujudkan demokrasi ekonomi,
- mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana ekonomi pendukung pengembangan usaha pertanian skala kecil, modal kerja, pengadaan sarana produksi, maupun kebijakan lainnya untuk menciptakan kondisi kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat.

## Peningkatan Ekspor

Salah satu peran penting pertanian adalah sumbangannya dalam penerimaan ekspor dan penghematan devisa. Peran ini perlu terus dilanjutkan dengan mengacu pada kondisi perdagangan internasional yang telah diliberalisasikan melalui berbagai kesepakatan, baik multilateral, regional maupun bilateral, seperti WTO, AFTA dan kerja sama perdagangan bilateral antar negara.

Potensi pertanian dalam arti luas cukup besar dalam upaya peningkatan ekspor, yaitu dari subsektor perkebunan dan perikanan. Beberapa komoditas peternakan dan hortikultura juga mempunyai prospek ekspor yang baik. Untuk mendorong pengembangan ekspor hasil-hasil pertanian melalui program-program pembangunan pertanian dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- memfasilitasi kegiatan promosi investasi, perdagangan dan ekspor di berbagai wilayah,
- meningkatkan kemampuan para petani, peternak dan nelayan serta pengusaha pertanian dalam menghasilkan produk-produk pertanian untuk ekspor, terutama dalam pengembangan produk, penerapan standar mutu, dan perbaikan mutu produk agar sesuai dengan permintaan berbagai pasar ekspor, termasuk penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan
- penyediaan pelayanan informasi pasar dan pemasaran, termasuk informasi mengenai harga dan prospek pasar, serta pengembangan terminal agribisnis.
- mengidentifikasi peluang-peluang investasi di bidang agribisnis, khususnya yang mempunyai prospek usaha untuk ekspor yang cukup baik.



## Gerakan Mandiri Peningkatan Produksi

Operasionalisasi pelaksanaan pembangunan pertanian yang difokuskan kepada ketiga program pengembangan tersebut di atas, khususnya dalam upaya peningkatan produksi komoditas-komoditas unggulan diformulasikan dalam bentuk

**Gerakan Mandiri merupakan suatu upaya meningkatkan kemandirian dan keberdayaan para petani, peternak, dan nelayan dalam menjalankan usaha pertaniannya agar tercapai efisiensi dan peningkatan daya saing komoditas.**

**Telah diluncurkan tiga Gema dan satu program peningkatan ekspor:**

- **Gema Palagung 2001**
- **Gema Proteina 2001**
- **Gema Hortina 2003**
- **Protekan 2003**

Gerakan Mandiri (Gema). Sementara itu, kegiatan pembangunan pertanian secara umum tetap dilaksanakan sesuai dengan program-program utama dan penunjang pembangunan pertanian. Konsep Gema ini disosialisasikan sebagai ciri ataupun tema dalam memobilisasi pemanfaatan seluruh sumberdaya pembangunan (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi, modal dan kelembagaan). Konsep Gema ini dipakai pula sebagai alat untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak terkait dalam bentuk koordinasi di tingkat perencanaan di pusat sampai daerah dan pelaksanaannya di lapangan.

Pada prinsipnya Gema ini merupakan suatu upaya meningkatkan kemandirian dan keberdayaan para petani, peternak, dan nelayan dalam menjalankan usaha pertaniannya agar tercapai efisiensi dan peningkatan daya saing komoditas, melalui langkah-langkah:

- Menyusun perencanaan sasaran dan langkah kegiatan dengan mempertimbangkan keragaman potensi sumberdaya alam antar wilayah.
- Meningkatkan kesadaran pihak-pihak terkait tentang peran strategis pertanian sebagai sektor penggerak pembangunan melalui peningkatan intensitas dan harmonisasi koordinasi lintas sektor. Hal ini penting, karena perumusan kebijakan yang menyangkut pembangunan pertanian tidak seluruhnya berada di bawah kewenangan Departemen Pertanian.
- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan para petani, peternak, dan nelayan untuk menerapkan teknologi rekomendasi melalui penyuluhan yang lebih



intensif dan mengupayakan penyediaan kredit usahatani bersubsidi serta memfasilitasi pengadaan sarana produksi di lapangan tepat waktu.

- Menyediakan insentif dan kondisi kondusif bagi petani, peternak dan nelayan agar mampu memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara optimal.

Sejak TA 1998/1999 telah diluncurkan tiga Gema dan satu program peningkatan ekspor perikanan, yaitu:

- 1) Gema Palagung 2001, yaitu Gerakan Mandiri Peningkatan Produksi Padi, Kedelai dan Jagung untuk mencapai swasembada tahun 2001;
- 2) Gema Proteina 2001, yaitu Gerakan Mandiri Peningkatan Produksi Protein Hewani dengan sasaran sampai tahun 2001;
- 3) Gema Hortina 2003, yaitu Gerakan Mandiri Peningkatan Produksi Hortikultura Tropika Nusantara dengan sasaran sampai tahun 2003;
- 4) Protekan 2003 yaitu Program Peningkatan Ekpor Hasil Perikanan dengan sasaran nilai ekspor sebesar US \$ 10 milyar pada tahun 2003.

Berikut disampaikan secara ringkas intisari dari konsep berbagai Gema-gema tersebut.

### Gema Palagung 2001

Gema Palagung 2001 adalah gerakan mandiri menuju swasembada padi, kedelai dan jagung pada tahun 2001. Sasaran Gema Palagung ini didasarkan atas prediksi permintaan atau kebutuhan terhadap ketiga komoditas pangan tersebut yang meliputi konsumsi pangan manusia, benih, pakan, bahan baku industri, serta kehilangan hasil. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui swasembada (*on trend*), dirumuskan sasaran produksi padi sebesar 54,3 juta ton, jagung 12,0 juta ton dan kedelai 2,2 juta ton pada tahun 2001. Untuk itu direncanakan luas panen komoditas tersebut berturut-turut 12,2 juta ha, 4,4 juta ha dan 1,7 juta ha (Tabel 1).



Tabel 1. Sasaran Produksi, Rata-rata Hasil dan Luas Panen padi, dan Kedelai Tahun 1999, 2000, dan 2001.

Tanam Musim (MT)	Produksi (000 ton)			Rata-rata Hasil Ku/ha			Luas Panen (000 ha)		
	PMI	PAT	Jumlah	PMI	PAT	Jumlah	PMI	PAT	Jumlah
<b>Padi</b>									
MT 1998/1999	32,170	926	33,096	46.0	25.0	44.9	6,993	371	7,364
MT 1999	17,893	1,011	18,904	45.3	25.0	43.4	3,948	404	4,352
Tahun 1999	50,063	1,937	52,000	45.8	25.0	44.4	10,942	775	11,716
MT 1999/2000	32,227	945	33,172	47.0	25.0	45.8	6,858	378	7,236
MT 2000	18,841	1,287	20,128	45.4	25.0	43.1	4,152	515	4,667
Tahun 2000	51,068	2,232	53,300	46.4	25.0	44.8	11,010	893	11,903
MT 2000/2001	33,033	949	33,982	47.1	25.3	45.9	7,021	376	7,397
MT 2001	18,538	1,740	20,277	45.4	25.0	42.4	4,083	696	4,779
Tahun 2001	51,570	2,689	54,259	46.4	25.1	44.6	11,104	1,072	12,176
<b>Jagung</b>									
MT 1998/1999	6,196	664	6,860	26.0	30.0	26.4	2,380	221	2,601
MT 1999	3,456	684	4,140	26.0	30.0	26.6	1,328	228	1,556
Tahun 1999	9,652	1,349	11,000	26.0	30.0	26.5	3,708	450	4,157
MT 1999/2000	6,898	229	7,127	27.4	28.1	27.4	2,519	81	2,601
MT 2000	3,165	1,258	4,423	26.1	30.0	27.1	1,211	419	1,631
Tahun 2000	10,063	1,487	11,550	27.0	29.7	27.3	3,730	501	4,231
MT 2000/2001	7,174	238	7,412	27.5	29.2	27.6	2,605	82	2,686
MT 2001	3,195	1,405	4,600	26.2	30.0	27.3	1,219	468	1,688
Tahun 2001	10,368	1,644	12,012	27.1	29.9	27.5	3,824	550	4,374
<b>Kedelai</b>									
MT 1998/1999	979	105	1,084	12.7	10.0	12.4	771	105	876
MT 1999	864	52	916	12.7	10.0	12.5	680	52	733
Tahun 1999	1,843	157	2,000	12.7	10.0	12.4	1,451	157	1,608
MT 1999/2000	1,061	90	1,150	12.9	11.0	12.8	821	81	902
MT 2000	838	112	950	12.9	11.0	12.7	648	102	750
Tahun 2000	1,899	201	2,100	12.9	11.0	12.7	1,470	183	1,653
MT 2000/2001	1,098	93	1,191	13.0	11.0	12.8	845	84	929
MT 2001	858	125	983	13.0	11.0	12.7	660	114	774
Tahun 2001	1,956	218	2,174	13.0	11.0	12.8	1,504	198	1,702



Dengan produksi padi sebesar 54,3 juta ton (34,3 juta ton setara beras), Indonesia pada tahun 2001 akan mencapai kembali swasembada beras. Pada tahun tersebut, penduduk Indonesia sekitar 213,6 juta jiwa dengan perkiraan konsumsi sebesar 134,4 Kg/kapita/tahun, sehingga kebutuhan konsumsi beras nasional mencapai 28,7 juta ton. Kebutuhan lainnya terdiri atas benih, industri, dan penyusutan/kehilangan sebesar 1,7 juta ton dan sisanya berupa stok di Bulog, pedagang dan masyarakat.

Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Peningkatan produktivitas melalui : (a) peningkatan ketersediaan dan pemasyarakatan penggunaan benih unggul, meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu, serta meningkatkan pelayanan pelepasan varietas, perijinan dan sertifikasi benih; (b) peningkatan efisiensi penggunaan sarana produksi melalui perbaikan teknologi cara tanam, pemupukan dan penggunaan air; (c) peningkatan kemampuan petani menerapkan teknologi rekomendasi melalui peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan Kredit Usahatani (KUT), peningkatan kemampuan dan kemandirian petani dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), pemanfaatan kredit modal kerja dan pengembalian KUT; dan (d) pengamanan penyaluran dan mutu sarana produksi terutama pupuk dan benih melalui kegiatan koordinasi pengadaan, monitoring penyaluran, mutu dan harganya.
- 2) Perluasan areal tanam melalui: peningkatan Indeks Pertanaman (IP), dengan (a) rekayasa teknologi antara lain dilakukan melalui pengaturan pola tanam, penerapan alsintan pra dan pasca panen, pengaturan penyediaan air; dan rekayasa sosial/budaya dilakukan antara lain dengan gerakan dan penyuluhan, serta peningkatan ketrampilan petani; (b) perluasan lahan baru, dilakukan pada lahan-lahan yang belum termanfaatkan secara optimal seperti pada lahan di daerah transmigrasi, lahan PIRBUN, area kehutanan, pengembangan pasang surut, daerah irigasi baru (Tabel 2); (c) pengembangan penerapan alat dan mesin pertanian guna mempercepat pengolahan tanah, pompanisasi dan panen/pasca panen dilaksanakan melalui pola pengembangan kelompok Usaha Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA).
- 3) Pengamanan produksi tanaman pangan melalui (a) Gerakan Tanam Serentak dengan pemantapan pola tanam sesuai dengan agroekosistem, dan penyediaan sarana produksi secara 6 tepat; mengembangkan pergiliran tanam dan varietas



untuk mengurangi resiko hama dan penyakit tanaman; (c) meningkatkan koordinasi pengaturan tata guna air dengan kegiatan pengembangan pompanisasi dan embung untuk mengamankan daerah-daerah andalan produksi yang rawan kekeringan, melaksanakan Gerakan Hemat Air, melaksanakan revitalisasi P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), dan mengembangkan tata air mikro dan surjan pada lahan pasang surut; dan (d) Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dilaksanakan dengan identifikasi dan pemetaan OPT utama, penyediaan alat dan cadangan pestisida pada daerah potensial eksplosif serangan dan daerah sumber serangan, pemasyarakatan penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT), dan mengembangkan sistem pengendalian OPT secara kelompok dalam setiap hamparan dan mendirikan posko-posko pengendalian.

Tabel 2. Rencana Pemanfaatan Lahan Pertanian Tahun 1999, 2000, dan 2001.

Usaha/Penggunaan lahan	Luas pemanfaatan lahan (Ha)			
	1999	2000	2001	Jumlah
a. Peningkatan Intensitas Pertanaman (PIP)	795,130	185,920	269,150	1,250,200
1) Lahan Kehutanan	76,430	10,110	13,460	100,000
2) Lahan Perkebunan	131,290	15,250	13,460	160,000
3) Lahan Pengembang	48,050	7,720	14,230	70,000
4) Lahan Jaringan Utama belum ada, sawah sudah ada	50,000	40,000	35,000	125,000
5) Lahan Huma/Ladang	138,565	29,635	72,000	240,200
6) Lahan Tadan Hujan	315,795	8,205	31,000	355,000
7) Lahan Rawa belum optimal	35,000	75,000	90,000	200,000
b. Penambahan Baku Lahan (PBL)	658,640	186,270	155,090	1,000,000
1) Lahan Jaringan Utama ada, sawah belum ada	25,000	50,000	35,000	110,000
2) Lahan Transmigrasi yang baru (PTA&PTB)	100,000	-	-	100,000
3) Lahan Transmigrasi yang belum diusahakan (PTD)	100,000	-	-	100,000
4) Lahan Huma/Ladang	433,640	81,270	70,090	585,000
5) Lahan Rawa tidak ditanami	0	55,000	50,000	105,000
Jumlah (a + b)	1,453,770	372,190	424,240	2,250,200



- 4) Penyelamatan hasil dilakukan melalui Gerakan Penyelamatan Hasil berupa pemasyarakatan dan optimalisasi penggunaan peralatan panen dan pasca panen; pengembangan UPJA; rehabilitasi penggilingan padi; dan pemasyarakatan Lumbung Pangan di Pedesaan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
- 5) Peningkatan pemasaran hasil dan agribisnis dengan membentuk dan memfungsikan kelembagaan pemasaran; mengamankan harga dasar gabah; memberikan pelayanan informasi pasar berisi informasi produk, pengembangan jaringan informasi pasar, dan pelatihan informasi pasar, dan selain itu, diupayakan pengembangan kemitraan usaha antara pelaku bisnis komoditi padi, kedelai dan jagung (petani, pedagang, dan industri pengolahan).
- 6) Pengembangan kemampuan petugas dan petani melalui pelatihan untuk petani berupa sekolah lapangan; pelatihan untuk petugas yang terdiri dari: PPL, pengawas benih, pengamat hama dan PPS; diklat petani yang dilaksanakan selama satu musim tanam melalui beberapa kali pertemuan di lahan usaha tani peserta.
- 7) Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem koordinasi yang dilakukan secara bertahap mulai tahap perencanaan sampai dengan operasional pelaksanaan, dalam kerangka peningkatan pelayanan sarana produksi, menyediakan skim kredit, ketersediaan air beserta infrastruktur.

### **Gema Hortina 2003**

Gerakan Mandiri Peningkatan Produksi Hortikultura Tropika Nusantara (Gema Hortina) 2003 dilaksanakan untuk mendorong laju peningkatan produksi hortikultura tropis yang menjadi unggulan nasional. Komoditas hortikultura yang dikembangkan adalah sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat unggulan yang bernilai ekonomi tinggi, mempunyai peluang pasar besar, mempunyai potensi produksi tinggi serta mempunyai peluang pengembangan teknologi. Gerakan ini diarahkan untuk mencapai sasaran produksi yang dihitung berdasarkan pada kebutuhan konsumsi dan ekspor komoditi hortikultura sebagai berikut :

- Meningkatnya ketersediaan hortikultura yang mengacu pada rekomendasi konsumsi per kapita dari FAO, yaitu sayuran dan buah-buahan masing-masing sebesar 65 kg/ kapita/ tahun.



- Meningkatnya volume dan nilai ekspor hortikultura Indonesia yang ditargetkan mencapai US\$ 600 juta pada tahun 2003.
- Tercapainya ketersediaan hortikultura nasional setara US\$ 10 Milyar.

Adapun komoditas unggulan yang dikembangkan adalah kentang, kubis, cabe merah, bawang merah, tomat, jamur (sayuran); pisang, mangga, jeruk, manggis, dan nenas (buah-buahan); anggrek. (tanaman hias); dan Jahe, kunyit (tanaman obat).



Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran areal seperti pada Tabel 3 dan Tabel 4 dilaksanakan pengembangan Sentra Agribisnis Hortikultura yang dalam pelaksanaannya dijabarkan melalui 2 (dua) pendekatan yaitu Penumbuhan Sentra dan Pemantapan Sentra melalui upaya penumbuhan serta pemantapan sentra ditambah dengan usahatani yang selama ini berlangsung diharapkan produksi hortikultura dapat dikembangkan lebih pesat lagi. Untuk tahun 1999 sasaran produksi hortikultura utama untuk buah-buahan sebesar 7,10 juta ton dan sayuran sebesar 1,07 juta ton (Tabel 5).

#### 1) Penumbuhan Sentra:

- Sayuran, dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan tidur potensial dan peningkatan Indeks Pertanaman (IP).
- Buah-buahan, dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan tidur potensial dan pemanfaatan kebun-kebun terlantar.
- Tanaman Hias dan Tanaman Obat, dilaksanakan melalui pemanfaatan lahan tidur potensial, pengembangan pola perguliran, pengembangan TOGA, tabulapot, dan tabulakar.

Tabel 3. Sasaran Areal Pengembangan Hortikultura Melalui Penumbuhan Sentra dalam Gema Hortina 2003

Komoditas	Luas Pengembangan (Ha)					
	1999	2000	2001	2002	2003	
<u>Sayuran</u>	Kentang	3,808	7,617	11,426	15,235	19,044
	Kubis	6,012	12,024	18,036	24,048	30,060
	Cabe	0	0	0	0	0
	Bawang Merah	337	674	1,011	1,348	1,685
	Tomat	9,120	18,241	27,362	36,483	45,604
	Jamur	128	257	386	515	644
<u>Buah-Buahan</u>	Pisang	9,468	9,468	9,468	9,468	9,468
	Mangga	6,630	6,630	6,630	0	0
	Jeruk	21,658	21,658	21,658	0	0
	Nenas	1,368	1,368	1,368	1,368	1,368
	Manggis	11,577	11,577	11,577	0	0
<u>Tanaman Hias</u>	Anggrek	100	50	100	68	50
<u>Tanaman Obat</u>	Jahe	11,340	14,418	35,653	24,398	26,166
	Kunyit	2,571	5,404	6,179	2,653	3,120

Tabel 4. Sasaran Areal Pengembangan Hortikultura Melalui Pemantapan Sentra dalam Gema Hortina 2003

Komoditas	Periode Gema Hortina 2003					
	1999	2000	2001	2002	2003	
<u>Sayuran</u>	Kentang	47,949	56,690	65,658	74,863	84,314
	Kubis	50,070	61,005	72,166	83,564	95,207
	Cabe	107,134	119,102	131,625	144,721	158,414
	Bawang Merah	61,104	68,230	75,669	83,435	91,539
	Tomat	40,405	53,021	65,799	78,745	91,864
	Jamur	805	1,005	1,207	1,412	1,619
<u>Buah-Buahan</u>	Pisang	24,509	33,977	43,445	52,913	62,381
	Mangga	74,411	81,041	87,671	94,301	94,301
	Jeruk	19,096	40,754	62,412	84,070	84,070
	Nenas	14,796	16,161	17,529	18,897	20,265
	Manggis	1,417	12,994	24,571	36,148	36,148
<u>Tanaman Hias</u>	Anggrek	193	293	443	643	461
<u>Tanaman Obat</u>	Jahe	2,000	19,425	18,858	33,771	44,340
	Kunyit	200	2,871	4,475	9,250	10,795



Tabel 5. Sasaran Produksi Hortikultura Tahun 1999 (Ton).

Komoditas	Penumbuhan Sentra	Pemantapan Sentra	Non Pemantapan	Jumlah
<u>Buah-Buahan</u>	50,701	4,240,095	2,812,277	7,103,073
- Pisang	9,468	1,470,540	1,470,570	2,950,578
- Mangga	6,630	1,488,220	595,288	2,090,138
- Jeruk	21,658	668,360	439,219	1,129,237
- Nenas	1,368	591,720	295,860	888,948
- Manggis	11,577	21,255	11,340	44,172
<u>Sayuran</u>	312,995	4,547,497	2,214,309	7,074,801
- Kentang	60,174	958,985	480,945	1,500,104
- Kubis	135,868	1,251,762	678,245	2,065,875
- Cabe	0	1,071,336	435,677	1,507,013
- Bawang Merah	2,662	611,043	320,749	934,454
- Tomat	108,531	606,082	276,469	991,082
- Jamur	5,760	48,289	22,224	76,273
<u>Tanaman Hias</u>	2,000	6,755	0	8,755
- Anggrek	2,000	6,755	0	8,755
<u>Tanaman Obat</u>	159,678	7,600	86,891	254,169
- Jahe	113,400	3,200	84,718	201,318
- Kunyit	46,278	4,400	2,173	52,851

## 2) Pemantapan Sentra Melalui Peningkatan Produktivitas

### *Sayuran*

- Pra Panen, melalui pengembangan varietas unggul bermutu, pengembangan pemupukan berimbang dan irigasi yang efisien, pengembangan manajemen kesehatan tanaman terpadu dan pengembangan manajemen pola tanam.
- Pasca Panen, melalui pengembangan standar mutu sayuran dan pengembangan teknologi kemasan.
- Pemasaran, melalui pengembangan informasi pasar, pembangunan terminal dan sub terminal agribisnis, pengembangan UPA (Unit Pengembangan Agribisnis).
- Kelembagaan, melalui pengembangan Usaha Jasa Pelayanan Saprotan, pengemasan dan Alsin, pengembangan kelompok usaha dan pengembangan jaringan komoditas.



### *Buah-buahan*

- Pra Panen, melalui pengembangan sistim perbenihan, penerapan teknologi pemupukan dan irigasi, manajemen pembungaan, dan penerapan manajemen kesehatan tanaman terpadu.
- Pasca Panen, melalui pengembangan standar mutu buah dan pengembangan teknologi kemasan.
- Pemasaran, melalui pengembangan informasi pasar, pembangunan terminal dan subterminal agribisnis, serta pengembangan Kelembagaan, melalui pengembangan jaringan informasi komoditas, pengembangan penangkar benih, pengembangan kelompok usaha, pengembangan usaha jasa saprotan, kemasan dan alsintan.

### *Tanaman Hias dan Tanaman Obat*

- Pra Panen, melalui penerapan teknologi pemupukan dan irigasi, pengembangan media tanam, penerapan manajemen kesehatan tanaman terpadu.
- Pasca Panen, melalui pengembangan teknologi perpanjangan daya tahan bunga, dan pengembangan teknologi kemasan.
- Pemasaran, melalui pengembangan informasi pasar, pembangunan terminal dan sub terminal agribisnis.
- Kelembagaan, melalui pengembangan usaha jasa pelayanan saprotan, pengemasan dan alsin, pengembangan kelompok usaha.

## **Gema Proteina 2001**

Gerakan Mandiri Peningkatan Produksi Protein Hewani tahun 2001 (Gema Proteina 2001) dilaksanakan untuk: (a) meningkatkan pendapatan petani hingga di atas upah minimum regional (UMR); (b) menghasilkan tambahan produksi daging dan telur sebagai sumber protein hewani untuk menunjang ketahanan pangan nasional, dan (c) meningkatkan ekspor atau substitusi impor dalam rangka



Tabel 6. Rekapitulasi Sasaran Upaya Khusus Peternakan GEMA PROTEINA 2001

Uraian		Keadaan Awal	Sasaran 1999/2000	Sasaran 2000/2001
<b><u>Ternak Ayam Buras</u></b>				
Lokasi	- Propinsi/Kabupaten	-	18/18	25/160
Target Group : KK/KT		-	7.600/304	80.000/3.886
Populasi	- Rataan/KK/Th	10-11	50-200	50-200
	- Kawasan (ekor)	1.000-1.100	1.200.000	4.210.000
Produksi Kawasan	- Daging (kg/th)	900	5.250.000	18.550.000
	- Telur (butir/th)	12.000-13.200	63.000.000	221.000.000
Pendapatan (Rp/STP)		<10.000	15.000	17.000
Kelembagaan		Belum Terbentuk	76	970
Unit Usaha Pengolah Pakan		-	38	160
<b><u>Ternak Itik</u></b>				
Lokasi	- Propinsi/Kabupaten	-	8/8	14/14
Target Group : KK/KT		-	3.200/126	9.200/360
Populasi	- Rataan/KK/Th	10-15	50-200	50-200
	- Kawasan (ekor)	1000-1500	160.000	460.000
Produksi Kawasan	- Daging (kg/th)	284-371	697.900	1.925.700
	- Telur (butir/th)	75.000-112.000	16.320.000	46.920.000
Pendapatan (Rp/STP)		< 10.000	15.000	17.000
Kelembagaan		Blm Terbentuk	32	90
Unit Usaha Pengolah Pakan		-	8	14
<b><u>Ternak Kambing</u></b>				
Lokasi	- Propinsi/Kabupaten	-	12/24	19/36
Target Group : KK/KT		-	1.620/108	2.880/192
Populasi	- Rataan/KK/ekor	4-6	11-20	11-20
	- Kawasan (ekor)	120-180	11.520	17.280
Produksi Kawasan	- Daging (kg/th)	500-900	151.200-201.600	211.680-282.240
Produksi Calon Bibit Unggul		-	580	890
Pendapatan (Rp/STP)		7.000 (<UMR)	10.000	14.000
Kelembagaan		Belum Terbentuk	54	96
<b><u>Ternak Domba</u></b>				
Lokasi	- Propinsi/Kabupaten	-	5/9	5/14
Target Group : KK/KT		-	1.200/80	1.800/120
Populasi	- Rataan/KK/Th	4-6	11-20	11-20
	- Kawasan (ekor)	120-180	9.240-11.760	12.900-16.460
Produksi Kawasan	- Daging (kg/th)	500-900	80.500-100.800	112.700-141.120
Produksi Calon Bibit Unggul		-	460-580	640-820
Pendapatan (Rp/STP)		7.000 (<UMR)	10.000	14.000
Kelembagaan		Belum Terbentuk	40	60



perolehan atau penghematan devisa negara. Sasaran tersebut akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran tambahan populasi dan produksi beberapa komoditas peternakan yang secara intensif diupayakan dalam Gema proteina ini pada tahun 2000/2001 sebagai berikut (Tabel 6):

- Ayam buras, populasi 4,2 juta ekor dengan produksi daging 18,5 ribu ton dan produksi telur 221 juta butir per tahun;
- Itik, populasi 460 ribu ekor dengan produksi daging 1,9 ribu ton dan telur 46,9 juta butir per tahun;
- Kambing, populasi 17,3 ribu ekor dengan produksi daging antara 211,7 hingga 282,2 ton per tahun;
- Domba, populasi antara 12,9 hingga 16,5 ribu ekor dengan produksi daging antara 112,7 dan 141,1 ton per tahun.

Tabel 7. Sasaran Populasi Ternak Tahun 1999 - 2001

Ternak	Populasi (000 ekor)		
	1999	2000	2001
Sapi Potong	12.118	12.547	12.771
Sapi Perah	334	354	361
Kerbau	2.918	3.088	3.096
Kambing	13.949	15.611	13.126
Domba	7.488	8.512	8.803
Babi	8.813	8.837	9.048
Kuda	575	587	558
Ayam Buras	271.488	279.823	286.455
Ayam Ras Petelur	41.009	46.659	45.446
Ayam Ras Pedaging	211.653	172.497	131.089
Itik	26.119	32.977	33.914

Secara keseluruhan sasaran produksi daging, telur dan susu tahun 1999 masing-masing adalah 1,183,500 ton, 615,500 ton dan 437,500 ton. Sementara itu, sasaran populasi ternak yang dihasilkan melalui pemberdayaan masyarakat peternak yang dilaksanakan dengan berbagai program pembangunan pertanian, reguler ataupun berupa Gema Proteina pada tahun 1999 dan 2000 disajikan dalam Tabel 7.

Langkah dan kegiatan pokok Gema Proteina 2001, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan efisiensi melalui peningkatan skala ekonomi usaha yang akan dicapai dengan pengembangan usaha peternakan dalam kawasan, yang dilengkapi dengan unit pengembangan perbibitan, unit pengembangan/pembesaran ternak, unit produksi pakan dan unit pelayanan kesehatan ternak.
- 2) Peningkatan produktivitas usaha peternakan melalui intensifikasi peternakan dengan penerapan saptas usaha peternakan, dan meningkatkan keterkaitan antar subsistem agribisnis.



- 3) Peningkatan mutu dan daya saing produk peternakan melalui penerapan manajemen mutu terpadu.
- 4) Pemberdayaan petani melalui pengembangan sumberdaya manusia, kelembagaan pelayanan serta perubahan pendekatan pembangunan ke arah desentralisasi, debirokratisasi, privatisasi dan kemitraan.

### Protekan 2003

Program Peningkatan Ekspor Hasil Perikanan (Protekan) 2003 adalah upaya peningkatan ekspor komoditas perikanan. Sasaran ekspor tahun 2003 sebesar US\$ 10,19 milyar yang terdiri dari: US \$ 2,9 milyar berasal dari ekspor komoditas hasil penangkapan (tuna, cakalang, ikan-ikan pelagis dan demersal), US \$ 6,79 milyar



berasal dari ekspor udang hasil budidaya tambak, US \$ 0,42 milyar berasal dari budidaya laut (rumput laut, kakap putih, kerapu, dan mutiara) dan US \$ 0,05 milyar dari budidaya air tawar (nila, kodok lembu dan labi-labi) (Tabel 8). Sasaran ekspor tersebut dicapai melalui peningkatan produksi perikanan pada tahun 2003 secara keseluruhan sebesar 9,96 juta ton, yang berasal dari usaha penangkapan di laut sebesar 4,96 juta ton, budidaya air payau sebesar 0,97 juta ton, budidaya laut sebesar 2,96 juta ton, budidaya air tawar sebesar 0,60 juta ton, perairan umum sebesar 0,47 juta ton (Tabel 9).

Untuk mencapai sasaran ekspor tersebut langkah-langkah pokok yang dilaksanakan melalui Protekan 2003 adalah:

- 1) Penangkapan berupa pengembangan perikanan laut dalam (*deep sea fisheries*) untuk ikan pelagis besar di perairan Laut Banda, Laut Seram-Tomini, Selat Makasar-Flores dan Laut Sulawesi serta Samudera Pasifik diarahkan untuk:
  - Peningkatan produksi ikan tuna melalui peningkatan produktivitas alat tangkap dengan alat bantu penangkapan atau rumpon dan penambahan unit penangkapan hand line berukuran 3-5 GT dan long line berukuran (50-100 GT).

Tabel 8. Sasaran Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan Tahun 1999-2003.

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003	Kenaikan/ th (%)
<b>Volume (ton)</b>						
<u>Penangkapan di laut</u>	677,517	803,666	926,413	1,045,780	1,161,708	14.47
- Tuna	49,517	63,675	77,829	91,967	106,126	21.10
- Cakalang	82,850	102,346	119,968	135,685	149,532	16.01
- Udang	33,605	34,125	34,645	35,230	35,750	1.56
- Ikan Demersal	156,645	187,020	215,871	243,198	269,000	14.52
- Ikan Pelagis kecil	224,700	285,200	345,700	406,200	466,700	20.13
- Ikan lainnya	130,200	131,300	132,400	133,500	134,600	0.83
<u>Budidaya laut</u>	76,033	121,322	172,338	247,215	316,475	43.27
- Rumput laut	70,560	113,460	160,624	230,880	293,900	43.35
- Kakap putih	4,320	5,940	8,640	11,340	15,660	38.07
- Kerapu	1,152	1,920	3,072	4,992	6,912	56.91
- Mutiara	1.32	1.84	2.31	2.63	3.20	25.12
<u>Budidaya di air payau</u>	64,050	122,868	232,652	334,663	474,640	66.71
<u>Budidaya di air tawar</u>	465	1,560	3,875	8,460	14,070	142.13
- Nila	400	1,200	3,320	7,600	12,920	143.90
- Kodok	15	180	285	390	495	305.52
- Labi-labi	50	180	270	470	655	105.86
<b>JUMLAH</b>	<b>818,065</b>	<b>1,049,416</b>	<b>1,335,278</b>	<b>1,636,118</b>	<b>1,966,893</b>	<b>24,57</b>
<b>Nilai (US\$ juta)</b>	<b>2,477</b>	<b>3,706</b>	<b>5,670</b>	<b>7,648</b>	<b>10,187</b>	<b>42,67</b>

Tabel 9. Sasaran Produksi Perikanan Menurut Jenis Usaha, 1999 - 2003

Rincian	1999	2000	2001	2002	2003	Kenaikan/ th (%)
<b>PERIKANAN LAUT</b>	<b>4,391,329</b>	<b>5,140,883</b>	<b>5,932,668</b>	<b>6,954,755</b>	<b>7,917,352</b>	<b>15.88</b>
1. Penangkapan	3,678,888	3,996,456	4,311,786	4,625,537	4,955,134	7.73
2. Budidaya	712,441	1,144,427	1,620,882	2,329,218	2,962,218	43.29
<b>PERIKANAN DARAT</b>	<b>1,330,482</b>	<b>1,447,185</b>	<b>1,613,205</b>	<b>1,817,385</b>	<b>2,040,689</b>	<b>11.30</b>
1. Bud. Air Payau	527,610	588,470	691,830	825,600	967,230	16.40
2. Bud. Air Tawar	394,672	438,085	486,275	539,765	599,139	11.00
3. Perairan Umum	408,200	420,630	435,100	452,020	474,320	3.83
<b>Jumlah</b>	<b>5,721,811</b>	<b>6,588,068</b>	<b>7,545,873</b>	<b>8,772,140</b>	<b>9,958,041</b>	<b>14.86</b>



- 
- Peningkatan produksi ikan cakalang dilakukan dengan pengembangan armada pole and line berukuran < 30 GT dan purse seine berukuran 100-400 GT.
  - Penangkapan ikan pelagis kecil dilaksanakan dengan pengembangan armada purse seine berukuran < 30 GT untuk Laut Banda dan Laut Seram-Tomini; dan purse seine berukuran 30-100 GT dan 100-400 GT di Samudera Hindia, Paparan Sunda, Laut China Selatan, Selat Makasar-Flores, Laut Arafura dan Laut Sulawesi-Pasifik.
  - Pengembangan produksi ikan demersal dengan menggunakan armada rawai dasar (bottom long line) berukuran 10-15 GT dan armada jaring berkantong 10-30 GT yang hanya dilakukan di Laut China Selatan dan Laut Jawa.
- 2) Pengembangan usaha budidaya perikanan dilakukan melalui budidaya tambak, budidaya laut, dan budidaya air tawar yang secara keseluruhan diharapkan dapat menyumbang devisa negara sebesar US\$ 7,25 milyar pada tahun 2003. Penerimaan devisa tersebut berasal dari budidaya tambak US\$ 6,79 milyar; budidaya laut US\$ 0,42 milyar; dan budidaya air tawar US\$ 0,05 milyar.

Komplemen terhadap Protekan, upaya peningkatan produksi perikanan melalui berbagai program pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan pasokan konsumsi dalam negeri. Misalnya pada tahun 1999 sasaran produksi hasil perikanan sebesar 5,72 juta ton, diperkirakan pasokan untuk konsumsi domestik sebesar 3,98 juta ton, yang berarti ketersediaan untuk konsumsi per kapita sebesar 19,21 Kg/tahun. Sementara itu, untuk ekspor sebesar 818.000 ton dengan nilai ekspor sebesar US \$ 2,48 juta.

---

## Langkah-langkah Reformasi Pembangunan Pertanian

Dalam satu tahun pertama Kabinet Reformasi Pembangunan telah dilaksanakan berbagai terobosan yang ditujukan untuk memacu gerak pembangunan pertanian. Inti dari terobosan itu pada dasarnya adalah upaya-upaya pemberdayaan petani, peternak dan nelayan agar mampu menjalankan usahanya secara efisien, serta peningkatan produktivitas dan daya saing. Upaya-upaya terobosan terutama diarahkan untuk memposisikan kembali sektor pertanian menjadi sektor andalan dan mesin penggerak pembangunan pertanian. Untuk memudahkan penyajian, beberapa langkah terobosan reformasi dibidang pertanian disajikan dengan klasifikasi aspek prasarana dan sarana produksi, pasar produk, kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat tani.

### PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PRODUKSI

Langkah reformasi dalam aspek sarana produksi pada prinsipnya ditujukan untuk secara gradual melepaskan berbagai proteksi dan subsidi harga untuk selanjutnya mengarah pada mekanisme pasar. Insentif usaha tidak lagi diberikan dalam bentuk kebijakan pengaturan harga tetapi pada penciptaan kondisi kondusif agar petani mampu menjalankan usahanya secara efisien.

Langkah-langkah reformasi dalam bentuk paket kebijakan 1 Desember 1998 tentang penghapusan subsidi pupuk dan pemberian insentif usahatani, berupa :

- 1) Menaikkan harga dasar gabah dari Rp 1.000/kg gabah kering giling (GKG), menjadi tiga macam harga bervariasi berdasarkan wilayah regional, yaitu Jawa, Kalsel, Sulsel, Sultra, Sulteng, Bali, NTB (Rp 1.400/kg), Sumatera (Rp 1.450/kg) dan propinsi lainnya di KTI (Rp 1.500/kg).
- 2) Memperbesar aksebilitas terhadap modal kerja berupa kredit usahatani (KUT) dengan menaikkan plafon nasional sehingga dapat melayani jumlah petani yang lebih besar, meningkatkan plafon/ha dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2,0 juta, dan



---

menurunkan suku bunga dari 14 persen menjadi 10,5 persen per tahun. Pada tahun pertanaman (TP) 1998 plafon KUT disediakan Rp 3,5 triliun dan pada TP 1999 ditingkatkan lagi menjadi Rp 6,5 triliun.

- 3) Membebaskan tata niaga pupuk yang selama ini dimonopoli PT PUSRI untuk selanjutnya diharapkan berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Produsen, importir, dan distributor umum diberi kesempatan untuk mengimpor pupuk dan menyalurkan ke petani melalui koperasi/pedagang pengecer. Melalui koordinasi dalam Tim Interdep memfasilitasi koperasi, perusahaan swasta, dan BUMN untuk mempercepat impor pupuk (ZA, TSP, dan KCI).
- 4) Menghapuskan subsidi harga pupuk dan memberikan peluang bagi produsen, importir, dan distributor umum menjual pupuk ke petani melalui koperasi/pedagang pengecer pada harga pasar.
- 5) Menugaskan PT. PUSRI untuk menyalurkan pupuk kepada petani tanaman pangan yang berada di daerah yang sulit dijangkau (*remote area*), yang diatur melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 26/MPP/Kep/I/1999.

Kebijakan reformasi lainnya yang telah diambil pemerintah untuk mendorong peningkatan efisiensi, daya saing dan percepatan pembangunan pertanian adalah:

- 1) Meningkatkan penyediaan kredit dan aksesibilitas pada program untuk usaha pertanian, khususnya untuk peternakan, perikanan dan mekanisasi pertanian melalui KKPA, KKOP, KPKU, dan skim kredit lainnya.
- 2) Mencabut SK Menteri Pertanian tentang penggunaan pestisida di bidang pertanian. Melalui pengaturan baru ini, kewajiban petani memiliki sertifikat aplikasi pestisida dihapus, sehingga mempermudah pemanfaatannya. Walaupun demikian aplikasi pestisida tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu (PHT).
- 3) Menyempurnakan SK Menteri Pertanian tentang uji multi lokasi dan pelepasan varietas. Melalui keputusan ini diharapkan terjadi percepatan penemuan dan pelepasan varietas unggul guna menunjang upaya peningkatan produksi melalui perbaikan produktivitas.
- 4) Mempercepat proses adopsi teknologi pertanian oleh petani dan para pengusaha melalui penyempurnaan keterkaitan penelitian-penyuluhan, gelar teknologi di daerah, dan pameran/pemasyarakatan hasil-hasil penelitian dengan frekuensi

---

yang lebih sering. Sumber teknologi sifatnya terbuka dalam arti tidak hanya berasal dari Badan Litbang Pertanian, tetapi dari lembaga penelitian lainnya, baik pemerintah maupun swasta, baik dari dalam negeri ataupun internasional.

- 5) Penangguhan pembayaran PPN 10 persen untuk impor bahan baku dan pakan ternak, untuk mendorong pertumbuhan sektor peternakan terutama unggas, yang paling terpuruk akibat krisis ekonomi.
- 6) Mulai mengembangkan industri perunggasan berbasis bahan lokal (resource base poultry industry).
- 7) Menerapkan pola "user pay" dalam pelayanan jasa kesehatan hewan, sehingga peternak terdorong untuk memelihara ternaknya dengan lebih baik.
- 8) Mengeluarkan deregulasi pengadaan kapal perikanan dan penghapusan sistim sewa kapal perikanan berbendera asing guna mempermudah pengadaan/impor kapal. Untuk memperlancar pengadaan kapal perikanan, pemerintah c.q. Departemen Pertanian, berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 391/Kpts/PL.810/IV/99, telah memperlonggar persyaratan ukuran berat minimal kapal yang boleh diimpor, Disamping berat kapal, umur kapal juga diubah dari sebelumnya 10 tahun menjadi 15 tahun.
- 9) Mengeluarkan deregulasi jalur penangkapan ikan guna memperbaiki pengawasan dan memberi peluang lebih luas kepada nelayan tradisional dan kecil.

## PENGEMBANGAN PASAR PRODUK

Kebijakan reformasi di bidang pasar produk merupakan upaya untuk mengarahkan pasar produk pertanian Indonesia mengantisipasi liberalisasi perdagangan. Pada dasarnya liberalisasi pasar bermanfaat untuk: (a) mendorong efisiensi alokasi sumberdaya, yang berarti juga pertumbuhan produksi dan nilai tambah dan (b) menghapus beban anggaran pemerintah yang ditimbulkan intervensi pasar oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain adalah:

- 1) Membuka pasar beras dalam negeri pada importir swasta, berlaku sejak 11 September 1998;
- 2) Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada koperasi dan LSM untuk ikut serta dalam pengadaan pangan dan penyaluran KUT;
- 3) Mengarahkan kebijakan harga beras tidak lagi pada kebijakan harga murah. Sementara itu untuk menjamin ketersediaan pangan bagi keluarga pra



- 
- sejahtera atau rawan pangan yang jumlahnya sekitar 17 juta KK didistribusikan beras murah untuk setiap KK sebanyak 20 Kg dengan harga Rp 1.000/Kg;
- 4) Menghapus kuota dan retribusi perdagangan ternak potong antar pulau, untuk menggalakkan perdagangan ternak potong;
  - 5) Menghapus ketentuan Bukti Serap (BUSEP) bagi industri pengolahan susu dalam negeri, yang memungkinkan terselenggaranya perdagangan bebas komoditas peternakan ini;
  - 6) Mempermudah prosedur dan ijin usaha dan kegiatan ekspor, khususnya di subsektor perikanan.

## **DEREGULASI UNTUK PENGEMBANGAN USAHA DAN EKONOMI WILAYAH**

Agenda reformasi di bidang pengembangan usaha di sektor pertanian yang telah diluncurkan antara lain berupa pendelegasian wewenang perizinan dan pelayanan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Pertanian, melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 1018/Kpts/KP.430/12/1998. Tujuan dari pendelegasian ini adalah untuk memberikan pelayanan prima kepada petani yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian dan lebih mendorong pertumbuhan sektor pertanian.

Secara rinci kewenangan perizinan dan pelayanan masyarakat yang didelegasikan kepada Kakanwil Deptan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - Pemberian izin usaha budidaya tanaman pangan dan hortikultura selain padi dan kedelai dengan luas lahan > 50-200 ha untuk penanaman modal yang menggunakan non-fasilitas PMA dan PMDN.
  - Rekomendasi penggunaan pestisida dengan pesawat terbang
- 2) Subsektor Peternakan
  - Pemberian izin usaha obat hewan sebagai distributor.
  - Pemberian izin pemakaian bahan baku obat hewan dalam ransum makanan ternak.



- Pengawasan lalu lintas bibit ternak antar pulau/propinsi.
- Pemberian izin usaha peternakan non PMA/non PMDN di bidang pembibitan untuk keperluan propinsi yang bersangkutan.
- Pemberian izin usaha peternakan untuk kegiatan budidaya ayam ras pedaging > 65.000 ekor per siklus; ayam ras petelur >45.000 ekor per siklus; itik, angsa, entok atau kalkun > 25.000 ekor campuran; burung puyuh > 50.000 ekor campuran; burung dara >50.000 ekor campuran; kambing, domba >1.500 ekor campuran; babi >625 ekor campuran; sapi potong > 500 ekor campuran; sapi perah >100 ekor campuran; kerbau >375 ekor campuran; kuda >250 ekor campuran; kelinci >5.000 ekor campuran; dan rusa >1.500 ekor campuran.
- Pemberian izin usaha pemotongan hewan dan atau unggas kelas B non PMA dan PMDN.

### 3) Subsektor Perikanan

- Pemberian izin usaha perikanan (IUP) pembudidayaan ikan bagi yang menggunakan tenaga kerja asing kepada usaha pembudidayaan ikan yang menggunakan non-fasilitas PMA dan PMDN di air tawar, air payau atau laut tanpa memperhatikan luas lahan
- Perizinan usaha perikanan dititikberatkan pada penegakan hukum dan peningkatan kinerja pelayanan masyarakat.

Selain itu, Departemen Pertanian telah mengusulkan beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menyangkut aspek-aspek sebagai berikut:

#### 1) Bidang Karantina Pertanian

- RPP tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan.
- RPP tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan.
- RPP tentang Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan.

#### 2) Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

- RUU tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)
- RPP tentang Pengawasan Pengadaan dan Peredaran Pupuk Budidaya Tanaman.
- RPP tentang Budidaya Tanaman.
- RPP tentang Alat Mesin Budidaya Tanaman.



### 3) Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan

- Rancangan Perubahan Keppres Nomor 22 Tahun 1990, tentang Pembinaan Peternakan Ayam Ras.
- RPP Penyerahan Urusan Peternakan kepada Dati I dan Dati II
- Rancangan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Standar.

### 4) Subsektor Perikanan

- RPP tentang Penyerahan Urusan Perikanan kepada Propinsi dan Kabupaten.
- RPP tentang Usaha Perikanan, Penyerahan Izin Kapal sampai dengan 50 GT.
- RPP tentang Sumberdaya Ikan

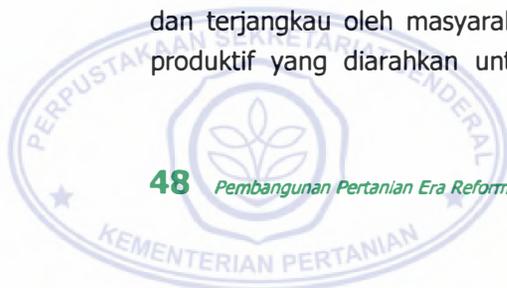
## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI, PETERNAK, DAN NELAYAN**

Pemberdayaan petani, peternak dan nelayan kecil merupakan salah satu langkah penting dalam upaya meningkatkan ketangguhan sektor pertanian. Kelompok masyarakat ini merupakan komponen terbesar dan mempunyai potensi yang besar untuk menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan. Yang diperlukan untuk memanfaatkan potensi tersebut adalah memberikan kepada mereka akses atas sumberdaya ekonomi terutama modal, sumberdaya alam, dan teknologi sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatannya.

Dalam upaya memberdayakan petani, peternak dan nelayan kecil itu, beberapa upaya terobosan yang telah diambil antara lain:

### **Program PKPN – MPMP**

Program peningkatan ketahanan pangan nasional melalui pemberdayaan masyarakat/petani (PKPN – MPMP) merupakan salah satu upaya penyelamatan ekonomi. Pada TA. 1998/99 program PKPN – MPMP ini merupakan bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Tujuan program ini adalah (1) meningkatkan ketahanan pangan yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat (food security), (2) menciptakan lapangan kerja produktif yang diarahkan untuk memberikan kesempatan kerja dalam kegiatan



---

ekonomi melalui pola padat karya produktif (employment creation), dan (3) pengembangan usaha kecil dan menengah untuk pemberdayaan ekonomi rakyat produktif yang berjiwa kooperatif melalui bantuan modal, pelatihan, penyuluhan, bimbingan serta bantuan promosi dan kemitraan usaha (*small and medium enterprises*). Fokus kegiatan diarahkan pada upaya untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, unggas, kambing/domba, sapi serta hasil budidaya ikan.

Dalam TA. 1998/99, kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah di bidang tanaman pangan dilakukan melalui upaya peningkatan mutu intensifikasi, perluasan areal tanaman, pengembangan sistem usaha tani IP 300. Di bidang peternakan, dilakukan pengembangan usaha ayam buras, itik, kambing/domba, dan sapi, untuk mencapai tujuan ketersediaan pangan protein hewani asal ternak. Di bidang perikanan dilakukan upaya pengembangan penangkapan, budidaya air tawar dan budidaya tambak, untuk mencapai tujuan peningkatan produksi perikanan nelayan dan petani ikan, serta pemberdayaan petugas dan petani melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan. Pada TA 1999/2000 program JPS pertanian difokuskan pada subsektor peternakan dan perikanan untuk memberdayakan ekonomi rakyat.

### **Peningkatan Aksesibilitas Petani dan Nelayan terhadap Modal Kerja**

Salah satu langkah terobosan yang dilaksanakan untuk meningkatkan upaya pemberdayaan petani adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap modal kerja melalui penyediaan skim-skim kredit yang merangsang pengembangan usaha agribisnis usaha kecil, menengah dan koperasi. Skim-skim kredit yang dikembangkan tersebut diupayakan mempunyai plafon unit usaha yang cukup, cakupan input dan komoditas yang lebih banyak, bunga yang murah serta prosedur pemanfaatannya yang sederhana. Dari berbagai skim kredit yang telah diluncurkan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pertanian/agribisnis adalah:

- Kredit Usaha Tani (KUT). Kredit ini sudah lama berjalan. Upaya terobosan yang dilakukan adalah menurunkan suku bungadari 14 persen menjadi 10,5 persen menyempurnakan mekanisme penyaluran dengan menyederhanakan prosedur dan proses pencairan serta pengembaliannya, perluasan cakupan komoditas dari 29 menjadi 35 meningkatkan plafon per hektar, dan meningkatkan plafon



---

ketersediaan kredit secara nasional sehingga dapat mencakup 50 persen usaha tani padi di Jawa dan 25 persen di luar Jawa.

- Kredit Koperasi Primer untuk Aggotanya (KKPA). Skim kredit ini sudah berjalan beberapa tahun, terutama untuk mendukung pembiayaan subsektor perkebunan. Upaya penyempurnaan yang dilakukan yang terkait langsung dengan subsektor pertanian diantaranya adalah untuk: usaha produktif peternakan, perikanan, dan mekanisasi pertanian. Setiap anggota dapat mengambil kredit dengan plafon Rp 50 juta dengan tingkat suku bunga 16 persen per tahun.
- Di samping kredit program tersebut, terdapat pula kredit komersial yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan petani, terutama untuk kelompok usaha menengah. Kredit komersial tersebut meliputi:
  - Kredit Proyek Pembinaan Peningkatan Petani dan Nelayan Kecil (Kredit- P4K);
  - Kredit Usaha Kecil (KUK);
  - Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES);
  - Kredit Kelayakan Usaha (KUK); dan
  - Modal Ventura

## **Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani Menuju Ketahanan Pangan Nasional**

Agenda reformasi pemberdayaan petani, peternak dan nelayan lainnya yang merupakan program nasional dan dilaksanakan oleh Departemen Pertanian bekerja sama dengan perguruan tinggi adalah Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani Menuju Ketahanan Pangan Nasional (Proksidatani). Program ini difokuskan pada pemberdayaan dan penegakan hak-hak petani melalui sistem pendampingan. Selain untuk memberdayakan petani, program pendampingan juga dimaksudkan untuk menyalurkan limpahan energi sosial masyarakat kampus dan LSM dalam menyebarkan semangat reformasi di kalangan masyarakat tani dan menghidup-suburkan koperasi sebagai lembaga perekonomian rakyat.

Program ini dicanangkan di Istana Merdeka pada tanggal 12 Juli 1998, dengan melibatkan 5.150 tenaga pendamping terdiri dari mahasiswa, sarjana baru dan tenaga LSM yang ditempatkan di 163 kabupaten pada 13 propinsi. Program ini dilaksanakan oleh perguruan tinggi di 13 propinsi tersebut, dengan dikoordinasi oleh Institut Pertanian Bogor. Tujuan Proksidatani adalah memberikan pelayanan

---

pendampingan kepada masyarakat tani dalam berbagai urusan yang terkait dengan usaha pertanian. Secara khusus program ini bertujuan diantaranya untuk:

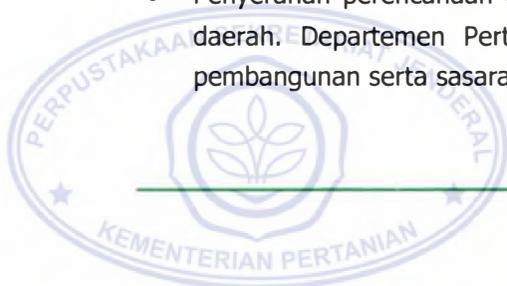
- a) Meningkatkan jumlah petani pemanfaat KUT dan memantau pemanfaatan KUT serta kelancaran pengembaliannya di seluruh wilayah pendampingan.
- b) Mendampingi kelompok tani dalam perencanaan, pengadaan dan pemanfaatan saprotan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
- c) Mendampingi kelompok tani dalam pengembangan kemampuan untuk menjadi kelompok usaha/koperasi tani; dan membantu memberdayakan kelompok tani, koperasi/KUD dalam bermitra usaha.
- d) Membantu menumbuhkembangkan kinerja koperasi di bidang administrasi, organisasi dan manajemen.
- e) Meningkatkan kualitas transfer teknologi tepat guna dalam produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian, pola konsumsi dan distribusi melalui koperasi.

### **Pengembangan Pendekatan Partisipatif dalam Pengelolaan Pembangunan Pertanian**

Dalam paradigma pembangunan pertanian yang baru, pada dasarnya pembangunan pertanian dilaksanakan oleh petani dan untuk keuntungan petani itu sendiri. Sebagai konsekuensi dari paradigma tersebut, pemerintah lebih berperan sebagai fasilitator, yaitu memudahkan, memperlancar, mendukung para petani melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya. Bidang usaha yang akan dilaksanakan oleh petani haruslah ditetapkan oleh petani. Untuk itu petani dibimbing untuk menganalisis risiko/keuntungan dari usaha yang akan mereka jalani dan mengambil keputusan mengenai bidang usaha yang akan mereka laksanakan. Hal ini dimulai dengan peningkatan komunikasi, saling mengerti mengenai peranan dan kegiatan masing-masing pihak. Untuk itu, pendekatan perencanaan pembangunan pertanian yang lebih partisipatif (artinya juga lebih terbuka/transparan) dan metodologi perencanaan yang disepakati bersama yang berorientasi pada kepentingan petani akan mewarnai perencanaan pelaksanaan pembangunan pertanian di masa akan datang.

Langkah-langkah yang telah dan akan terus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah diantaranya adalah:

- Penyerahan perencanaan dan pembahasan pemanfaatan anggaran sektoral di daerah. Departemen Pertanian memberikan arahan kebijakan dan strategi pembangunan serta sasaran-sasaran nasional.



- 
- Proses perencanaan tahunan dilaksanakan dengan metoda kombinasi antara bottom-up dan top-down, dengan porsi yang lebih banyak pada perencanaan bottom-up, mengingat pelaksana pembangunan pertanian berada di daerah dan menyadari adanya keragaman potensi pembangunan di masing-masing daerah.
  - Meningkatkan kemampuan aparat pertanian di daerah untuk menyusun perencanaan secara partisipatif.



---

## Hasil-hasil Pembangunan Pertanian

### TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Upaya peningkatan produksi melalui Gema Palagung 2001 dan program-program pembangunan secara keseluruhan menampakkan hasil yang cukup memuaskan. Produksi padi tahun 1998 mencapai 48,5 juta ton GKG, yang berarti meningkat sekitar 2 juta ton dibandingkan Ramalan II BPS yang dibuat sebelum Gema Palagung diluncurkan pada bulan Juli 1998. Keberhasilan ini diperoleh dari adanya kenaikan luas panen sekitar 470.000 ha dibandingkan luas panen 1997, yaitu mencapai 11,6 juta ha. Apabila produktivitas dapat dipertahankan, tentu peningkatan produksi akan lebih besar lagi. Pada tahun 1998 rata-rata produksi per ha padi turun dari 4,43 ton/ha menjadi 4,17 ton/ha (-1,8 %). Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang berdampak pada berkurangnya kemampuan petani menerapkan teknologi dan hilangnya pupuk dari pasaran.



Produksi jagung tahun 1998 mencapai 10,06 juta ton pipilan kering (meningkat 14,7%), sebagai hasil dari peningkatan luas panen dan produktivitas karena meningkatnya pemanfaatan benih unggul komposit dan hibrida. Pada tahun 1998, luas panen jagung mencapai 3,8 juta ha dengan hasil 2,62 ton/ha. Sementara itu, produksi kedelai tahun 1998 menurun dibandingkan dengan tahun 1997, karena adanya penurunan luas panen. Pada tahun 1998, luas panen kedelai 1,1 juta ha sedangkan produktivitasnya sebesar 1,3 ton/ha. Iklim dengan musim kering yang basah menciptakan kondisi kondusif bagi pertanaman jagung, tetapi kurang baik bagi usahatani kedelai.

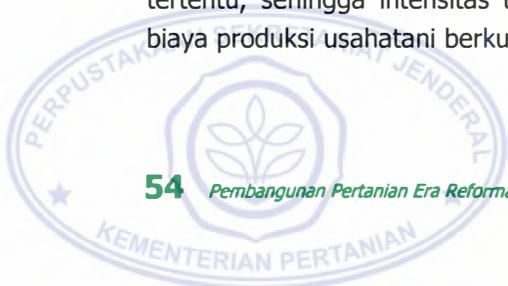
**Varietas tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tahun 1999:**

- **Padi :**
  - **Batanghari dan Dendang (padi rawa)**
  - **Widas (padi sawah)**
  - **Ketango (padi ketan)**
  - **Limboto (padi gogo)**
- **Jagung hibrida: Semar-4, Semar-5, Semar-6, Semar-7, Semar-8, Semar-9**
- **Kedelai : Burangrang**
- **Buncis rambat: Horti-1, Horti-2, Horti-3**
- **Tomat : Mirah, Opal, Zamrud**
- **Mentimun : Saturnus, Pluto, Mars**

Realisasi tanam Gema Palagung dalam dua musim tanam (MK II 1998 dan MT1998/99) sampai pertengahan Mei 1999 telah mencapai 12,28 juta ha atau 86,89 persen, yang terdiri atas: padi 9,07 juta ha atau 87,1 persen, jagung 2,25 juta ha atau 102,73 persen, dan kedelai 964 ribu ha atau 62,86 persen dari rencana. Pencapaian realisasi tanam tersebut ditempuh melalui: Perluasan Areal Tanaman 924.454 ha, Peningkatan Mutu Intensifikasi 11,24 juta ha, dan IP Padi 300 seluas 123.657 ha. Realisasi ini didukung oleh pemanfaatan kredit usahatani (KUT) yang meningkat pesat. Sampai 15 April 1999, diperkirakan KUT yang

diusulkan Rp. 4,36 triliun, Rp. 3,75 triliun di antaranya sudah disalurkan kepada petani untuk 3,16 juta hektar pertanaman.

Varietas unggul memegang peranan penting dalam upaya pencapaian dan pelestarian swasembada serta ketahanan pangan nasional. Varietas demikian mempunyai ciri berproduksi tinggi, berumur pendek, dan tahan terhadap hama/penyakit tertentu, sehingga intensitas tanam meningkat, penggunaan pestisida berkurang, biaya produksi usahatani berkurang, dan akhirnya pendapatan petani meningkat.



Pada tahun 1998/99 telah dihasilkan 58 varietas tanaman pangan dan hortikultura, dan 37 varietas diantaranya telah dilepas, serta 21 varietas lagi sedang dipersiapkan untuk dilepas guna mendukung Gema Palagung 2001 dan Gema Hortina 2003. Varietas yang sudah dilepas tersebut adalah: jagung 4 varietas, kedelai 4 varietas, kacang tanah 3 varietas, kacang hijau 1 varietas, kacang tunggak 4 varietas, ubi jalar 2 varietas, ubi kayu lokal 1 varietas, tanaman buah-buahan 9 klon, dan tanaman hias 9 varietas. Varietas yang siap untuk dilepas adalah : tanaman padi 5 varietas, jagung 6 varietas, kedelai 2 varietas, tomat dederan lokal 3 varietas, buncis rambat 3 varietas, dan mentimun 3 varietas.

## PETERNAKAN

Dengan masih berlanjutnya krisis ekonomi, pertumbuhan populasi, produksi, dan produktivitas ternak tahun 1998 masih mengalami penurunan. Pada tahun 1996 produksi daging mencapai 1,6 juta ton, telur 779,8 ribu ton, dan susu 441,2 ribu ton, sedangkan pada tahun 1998 turun menjadi 1,3 juta ton daging, 597,8 ribu ton telur, dan 405,5 ribu ton susu. Penurunan produksi tersebut telah berpengaruh terhadap pertumbuhan subsektor peternakan yang diharapkan naik 6,4 persen,



---

ternyata turun 2-3 persen pada tahun 1997, dan pada tahun 1999 diperkirakan turun 0,65 persen.

Usaha peternakan yang sangat terpengaruh dan terpuruk oleh krisis moneter dan ekonomi adalah usaha peternakan ayam ras dan industri sapi potong. Terpuruknya usaha perunggasan disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya biaya produksi, sedangkan keterpurukan industri sapi potong disebabkan karena usaha ini mengandalkan diri dari pasokan impor sapi bakalan. Namun demikian masih ada komoditas ternak yang relatif tidak terpengaruh, yaitu ternak ayam buras, itik, kambing, dan domba. Untuk usaha ternak sapi perah justru memiliki peluang yang cukup besar dikembangkan, karena sebagian besar bahan baku untuk konsumsi susu di dalam negeri masih impor.

Untuk mengantisipasi krisis tersebut, pada tahun 1998 telah dilakukan upaya pengembangan komoditi ayam buras, itik, kambing/domba, dan sapi melalui pemberdayaan usaha peternakan rakyat yang dikenal dengan Gema Proteina 2001. Dipilihnya komoditi ternak ini untuk dikembangkan, karena sebagian besar konsumsi daging pada tahun 1997 berasal dari daging ternak tersebut, yaitu 36,3 persen dari daging ayam ras pedaging, 21,5 persen dari daging ayam buras, 23 persen dari daging ayam negeri, dan 7 persen dari daging domba/kambing.

## PERIKANAN

Pembangunan subsektor perikanan difokuskan pada upaya mengatasi krisis dan dampak yang ditimbulkannya melalui peningkatan penyediaan bahan pangan sumber protein hewani, pemberdayaan usaha ekonomi petani nelayan, peningkatan ekspor hasil perikanan, dan peningkatan penyediaan tepung ikan sebagai substitusi impor. Berbagai kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tahun 1998/ 1999, antara lain:

- 1) Pemberdayaan Perikanan Rakyat dilaksanakan melalui Upsus Perikanan di bidang penangkapan dan budidaya di tujuh propinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung dan DI Aceh), dengan menyediakan dan menyalurkan bantuan suku cadang mesin dan bahan alat penangkap ikan, pemberian bantuan operasional budidaya tambak dan budidaya air tawar, serta pembangunan saluran tambak dengan menerapkan sistem tandon. Pengembangan budidaya tambak melibatkan 1.133 orang yang ter-

gabung dalam 84 kelompok; pengembangan budidaya air tawar dilaksanakan bagi 3.082 orang dalam 146 kelompok. Hasil sementara (sampai April 1999) telah diproduksi ikan senilai Rp 920 juta dengan dana yang digulirkan Rp 72 juta pada budidaya tambak dan nilai produksi sebesar Rp 107 juta pada budidaya air tawar.

- 2) Peningkatan prasarana perikanan melalui rehabilitasi/ pengembangan 18 buah pelabuhan perikanan, 40 buah pangkalan pendaratan ikan, 1 buah Sekolah Pembangunan Perikanan, 1 buah Akademi Pembangunan Perikanan, 1 buah Sekolah Tinggi Perikanan, 1 buah Balai Pengembangan Penangkapan Ikan, dan 1 buah Balai Ketrampilan Penangkapan Ikan.
- 3) Pembangunan tambak di 10 propinsi utama untuk merehabilitasi saluran tambak 5.650 ha, pemberian bantuan agroinput pada dem area 1.475 ha dan



---

dempond 35 unit, rehabilitasi *Shrimp Disease Laboratory* beserta peralatan 4 unit, dan perbaikan sarana dan fasilitas perbenihan ikan. Melalui upaya ini peningkatan produksi perikanan budidaya dan penangkapan diharapkan menjadi pesat, sehingga penyediaan protein hewani dari ikan dan ekspor hasil perikanan meningkat.

## AGRIBISNIS

Berbagai kegiatan pembangunan yang diselenggarakan melalui pengembangan agribisnis, diarahkan untuk mengubah pendekatan pembangunan pertanian yang berorientasi produksi menjadi pembangunan pertanian pedesaan yang berorientasi agribisnis. Sehubungan dengan itu, telah dilakukan berbagai upaya antara lain:

- 1) Penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk pertanian dan pemasarannya kepada dunia usaha.
- 2) Pengembangan 116 kelompok usaha bersama sebagai cikal bakal koperasi pada Sentra Agribisnis Komoditas Unggulan (SPAKU).
- 3) Identifikasi potensi investasi agribisnis di seluruh wilayah Indonesia.
- 4) Pengembangan Terminal Agribisnis yang akan dikelola oleh swasta, PMDN, BUMN, atau bermitra dengan pemerintah.
- 5) Pengembangan informasi pasar produk pertanian melalui media elektronik dan media cetak.
- 6) Pengembangan agribisnis melalui Lembaga Mandiri Yang Mengakar di Masyarakat (LM3). Beberapa LM3 yang telah dibentuk sudah berkembang menjadi pusat agribisnis.
- 7) Mengupayakan penyediaan kredit modal ventura dan kredit Taskin bagi usaha agribisnis.
- 8) Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) sebagai usaha komersial di pedesaan dengan menggunakan dana bergulir.
- 9) Membangun kemitraan usaha yang sudah dilaksanakan di Lampung melalui pendirian 10 unit Industri Tepung Tapioka Rakyat (ITTARA), yang telah berhasil meredam fluktuasi harga dan menghidupkan koperasi.



## PEMBINAAN SUMBERDAYA MANUSIA

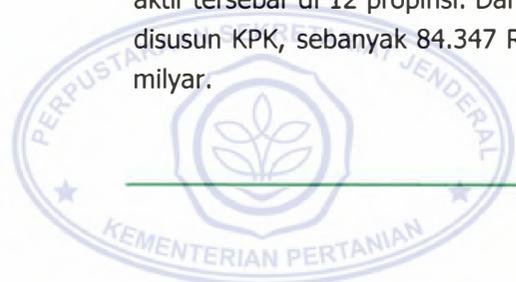
Sumberdaya manusia (SDM) merupakan satu-satunya faktor penggerak dalam pembangunan pertanian. Sekitar 88,9 persen tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian memiliki tingkat pendidikan tamat Sekolah Dasar atau lebih rendah, walaupun sudah terdapat indikasi meningkatnya minat masyarakat yang berpendidikan untuk terjun di bidang pertanian/agribisnis. Untuk meningkatkan keterampilan para petani, peternak, dan nelayan, pada saat ini terdapat 33.688 orang tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan, yang tersebar di 299 BIP atau meliputi 3.560 BPP. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian, telah dilaksanakan:

- Peningkatan jenjang pendidikan penyuluh menjadi sekurang-kurangnya D3. Pada saat ini ada sekitar 4.418 orang penyuluh yang sedang mengikuti pendidikan dan latihan Ahli Madya Penyuluh Pertanian (APP) di Magelang, Medan, Bogor, Malang, Gowa, Sidoarjo, dan Bitung.
- Pengaturan kembali pembinaan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian dan memperkuat personel Balai Penyuluh Pertanian.
- Menyalurkan bantuan kegiatan operasional penyuluhan pertanian (BKOPP) secara langsung kepada penyuluh.

Melalui peningkatan kualitas DM penyuluh ini diharapkan pembinaan SDM pertanian (para petani, peternak, nelayan) dapat ditingkatkan, dengan pendekatan pemberdayaan mereka agar mandiri dalam melaksanakan usaha pertaniannya.

Program pembinaan petani yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berusaha terus dilanjutkan, salah satunya adalah program P4K. Pada saat ini terdapat 47.874 kelompok petani kecil, dan 37.341 kelompok di antaranya masih aktif tersebar di 12 propinsi. Dari 88.866 Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun KPK, sebanyak 84.347 RUB telah direalisasikan kreditnya dengan nilai Rp 138,7 milyar.

**Upaya peningkatan kemampuan kapasitas para petani, peternak, dan nelayan dalam meningkatkan pendapatannya melalui pengembangan ekonomi rakyat ditempuh dengan menumbuhkan koperasi pertanian. Sejak tahun 1998 telah dibina 179.740 kelompok tani agar berkembang secara mandiri. Sampai Mei 1999 telah terbentuk 2.062 koperasi pertanian berbadan hukum dan 13.713 koperasi yang belum berbadan hukum.**



---

## Penutup

Pembangunan pertanian berkelanjutan pada masa datang bukan lagi sekedar bertumpu pada persoalan produksi semata-mata, akan tetapi berwawasan peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Basis dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tani ini adalah pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dan ketrampilan, pendapatan, serta upaya perbaikan pelestarian sumberdaya dan lingkungan hidup disertai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendapat prioritas yang tinggi dalam pembangunan pertanian pada era reformasi ini.

Eksistensi petani, peternak dan nelayan sebagai subyek pembangunan seyogyanya semakin menonjol. Untuk itu hubungan pembinaan yang bersifat "pengarahan" secara bertahap perlu diubah menjadi hubungan yang bersifat dialog untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Proses pembinaan harus ditujukan untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak kepada petani, peternak dan nelayan sesuai aspirasinya yang paling humanistik yaitu peningkatan kesejahteraan.

Bertitik tolak dari perspektif di atas maka kerangka strategi pembangunan pertanian pada era reformasi hendaknya dititikberatkan pada pengembangan agribisnis. Pembangunan pertanian tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam suatu kesatuan sistem agribisnis yang mampu memanfaatkan sumberdaya domestik secara maksimal. Strategi ini sekaligus merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk mencapai beberapa tujuan, yang antara lain menyediakan pangan yang berkualitas dan cukup bagi masyarakat, menciptakan struktur perekonomian yang tangguh dan efisien, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan penerimaan devisa, yang sekaligus untuk lebih memperkuat ketahanan nasional.

Pendekatan di atas akan mampu menjadikan pertanian sebagai sektor andalan dalam pembangunan ekonomi nasional. Keinginan menjadikan sektor pertanian sebagai sektor andalan (leading sector) dalam pembangunan ekonomi akan terwujud apabila dirumuskan menjadi komitmen nasional. Komitmen tersebut secara



---

formal harus tercermin dalam program nasional yang merupakan landasan legal untuk memperoleh dukungan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam mewujudkan keinginan tersebut, pada era reformasi ini masyarakat pertanian harus terbuka terhadap segala kemungkinan perubahan dalam melaksanakan pembangunan pertanian, termasuk implementasi dari Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. beberapa hal pokok yang perlu diantisipasi dengan baik perubahannya adalah penyesuaian organisasi/ kelembagaan, peran aparat dalam tata hubungannya dengan masyarakat petani, peran pemerintah/ institusi pusat dalam hubungannya dengan pemerintah daerah, kebijakan dan strategi pembangunan, dan struktur program-program dan proyek-proyek pembangunan pertanian. Selanjutnya, penyiapan sumberdaya manusia menjadi faktor kunci bagi kelancaran proses pembaharuan tersebut.

